

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK ABDUL GAFAR USMAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
(DPD RI) DAERAH PEMILIHAN RIAU PERIODE 2009-2014  
TERHADAP KONSTITUENNYA DI PROVINSI RIAU

# SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas-tugas guna  
memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)  
pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau



OLEH :

**A Z R I Z A L**  
NIM : 10643004251

**PROGRAM S.1  
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI (JR)**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
R I A U  
2013**

## ABSTRAK

**AZRIZAL**, 10643004251, Penelitian ini berjudul “*Strategi Komunikasi Politik Abdul Gafar Usman Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Riau Periode 2009-2014 terhadap Konstituennya di Provinsi Riau*”. Lokasi penelitian dilaksanakan pada tanggal 11 Januari s/d 30 Januari 2013 bertempat di Kantor Senator DPD RI Pekanbaru dan Gedung MPR/DPD RI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh Abdul Gafar Usman sebagai anggota DPD RI Daerah Pemilihan Riau terhadap konstituennya di Provinsi Riau. Bagaimana proses komunikasi politiknya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan study dokumentasi dan wawancara (Interview Guide) dengan informasi yang telah ditentukan dan memilihnya sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah Analisa Dekriptif Kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Abdul Gafar Usman sebagai anggota DPD RI Daerah Pemilihan Riau periode 2009-2014 memiliki strategi komunikasi politik pendekatan persuasif dan mempergunakan jaringannya di daerah di Riau serta jaringan organisasi yang digelutinya dari dulu, memanfaatkan media (cetak, elektronik dan teknologi informasi lainnya) dalam mengkomunikasikan pesan politiknya. Abdul Gafar Usman selalu memakai metode “3 S (Serap, Sampaikan dan Selesaikan”. Sehingga dengan hal ini pesan-pesan yang disampaikan ke kontituennya sangat menghujam dan jitu dibenak konstituennya tersebut.

Strategi komunikasi Abdul Gafar Usman kepada konstituen, **Pertama**, Komunikasi langsung dengan konstituen ketika melaksanakan kunjungan atau reses (Ceramah, Diskusi, dll), melakukan komunikasi dimedia cetak dan media elektronik. **Kedua**, Setiap kunjungan atau kegiatan reses Abdul Gafar Usman selalu menyampaikan pesan kepada konstituennya agar menjalankan perintah agama dan menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. **Ketiga**, Menyampaikan tugas dan wewenang DPD RI terhadap konstituen di daerah pemilihannya.

Faktor penghambat dalam proses komunikasi politik Abdul Gafar Usman (anggota DPD RI daerah pemilihan Riau), yaitu terletak pada keterbatasan tugas dan wewenang DPD RI yang tidak sama dengan lembaga legislatif lainnya di MPR, minimnya pemahaman masyarakat tentang lembaga DPD RI karena lembaga ini lembaga baru dalam ketatanegaraan di Indonesia, DPD RI tidak mempunyai kantor khusus di daerah. Sedangkan faktor pendukungnya adalah memanfaatkan media yang sudah ada dalam penyampaian tugas dan pokoknya sebagai anggota DPD RI, fasilitas yang cukup untuk melakukan kegiatan dengan konstituennya, memanfaatkan jaringan yang sudah ada untuk melakukan komunikasi politiknya.

## KATA PENGANTAR

Rasa puji dan syukur sudah sepantasnya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya Shalawat beriring salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul *“Strategi Komunikasi Politik Abdul Gafar Usman Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Riau Periode 2009-2014 terhadap Konstituennya di Provinsi Riau”*.

Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan serta arahan yang konstruktif buat penulis. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda (Nasrizal) dan Ibunda (Fatmawati) tersayang dan tercinta yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, rasanya tak seujung rambutpun dapat penulis balas.
2. Bapak Prof. DR. H.M. Nazir Karim, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak DR. Amril M, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau periode 2009-2013, dan Bapak DR. Yasril Yazid, MIS, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau periode 2013-2017.

4. Bapak DR. NURDIN selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Penasehat Akademis, seluruh dosen, karyawan/wati dilingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, motivasi dan dukungan selama penulis melaksanakan perkuliahan.
5. Bapak Sudianto, S.Sos. M.I.Kom selaku penasehat akademis yang telah memberikan penulis motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak DR. Yasril Yazid dan Bapak Yantos, S.IP selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga telah banyak waktu dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penulis.
7. Segenap Pimpinan dan Karyawan perpustakaan di UIN Suska Riau, baik itu perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA Riau maupun perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan penelitian.
8. Yang terhormat Ayahanda Drs. H. Abdul Gafar Usman, M.Sc selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Riau periode 2009-2014 yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian.
9. Kakak-kakak dan adikku yang tersayang, secara tidak langsung telah memberikan motivasi kepada penulis untuk bisa sukses dan mencapai gelar sarjana. Terimakasih semoga Allah SWT selalu melindungi keluarga kita dan kita harus bangkit menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.

10. Kakanda-kakandaku yang selama ini telah memberikan motivasi dan arahnya kepada Penulis, membimbing dan mengajarkan penulis tentang arti sebuah kehidupan yang hakiki. **Ontuo Mardailis** “OGB” terimakasih yang telah mendidik dan membina penulis mulai dari SMA. **Kakanda Nurhamin**, yang telah mengajarkan saya menjadi seorang pemimpin yang selalu konsisten, peduli dengan kelanjutan studi saya, terimakasih atas supportnya selama ini, **Kakanda Asynin**, hidup itu butuh kesabaran, menjadi orang sukses harus dari kesungguhan dan kerja keras. Terimakasih atas segala nasehatnya, saya yakin saya akan seperti Kakanda, membangun pondasi ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan selama ini kepada penulis.
11. Keluarga Besar Muhammadiyah Kab. Kampar (Rekan-rekan IPM Kampar, Pemuda Muhammadiyah Kampar dan Ayahanda Muhammadiyah Kampar), bahwa saya dibesarkan dari lingkungan ini. Ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada keluarga Besar Muhammadiyah Kampar.
12. Terimakasih kepada Keluarga Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Kampar (IPMK) Pekanbaru, yang telah memberikan amanah dan kesempatan pada Penulis untuk belajar menjadi seorang pemimpin (Presiden IPMK Pekanbaru Periode 2011-2012). Saya berharap kedepan organisasi ini bisa mempererat hubungan silaturrahi antar mahasiswa Kab. Kampar di Pekanbaru, menjadi laboratorium pemimpin untuk kemajuan Kab. Kampar kedepan.
13. Teman-teman seperjuangan di Ikatan Remaja/Pelajar Muhammadiyah Riau, DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pekanbaru, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia

(IMI KI), DPD KNPI Riau, Pergerakan Mahasiswa Riau dan seluruh organisasi yang pernah penulis geluti. Terimakasih atas bantuan dan supportnya.

14. Teman-teman seperjuangan “siang-malam” yang merupakan keluarga yang berarti dalam hidup penulis, yaitu, Rudi “Tanjung”, Tri Wahono, Bg Rizal. S Hendra Saputra, Arif Imron, Aan Amza, Firnanda Ahmad dan Iwan Kurniawan, serta lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas jasa, dorongan dan supportnya, semoga kita berhasil.
15. Adinda sekaligus Juniorku, Ahmad Kamal, Ardi Amsyar, Abdul Jalil dan Ali Sanusi, terimakasih banyak telah mengingatkanku betapa pentingnya pendidikan itu. Lanjutkan perjuangan kalian, semoga kita berhasil.
16. Adinda Yulisa Asvisari “Seseorang yang spesial” yang sudah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran yang membangun semua pihak guna kesempurnaan Skripsi ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, Amin....

Pekanbaru, 06 Mei 2013

**A Z R I Z A L**  
NIM : 10643004251

# Persembahan



*Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, kupinta ridhomu terima sujud baktimu. Lelap dalam masa-masa pengorbananmu, mencari nafkah siang malam demi masa depanku kelak menjadi orang yang berguna. Segala derita dan rintangan engkau hadapi demi masa depanku....*

*Ayah... Ibu.... Kini ananda persembahkan kepadamu serangkaian perjuangan yang ananda lakukan selama 7 tahun yaitu berupa tugas akhir (skripsi) untuk memperoleh gelar Sarjana yang Ayahanda dan Ibunda nantikan, susah senang yang ananda alami selama mendapatkan semuanya ini adalah berkat do'a tulus dari Ayahanda dan Ibunda.*

*Sekali lagi ucapan terimakasih yang tak terhingga ananda ucapkan buat, kelak dikemudian hari ananda menjadi orang yang berguna bagi bangsa ini...*

*Sahabat-sahabatku Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2006, perjuangan kita belum usai kawan, ketika darah kita sudah berhenti mengalir pada tubuh ini, maka itulah akhir dari perjuangan kita. Terimakasih atas semangat yang kawan-kawan berikan, sehingga tugas akhir ini bisa saya selesaikan....*

**Oleh : Azrizal**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SKEMA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Alasan pemilihan judul .....	6
C. Penegasan istilah.....	7
D. Permasalahan.....	11
E. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	12
F. Kerangka teoritis dan konsep operasional.....	12
G. Metode penelitian .....	31
H. Sistematika penulisan.....	36

### BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia .....	38
1. Pendahuluan.....	38
2. Fungsi, tugas dan wewenang DPD RI.....	39
3. Visi dan misi DPD RI.....	40
4. Alat kelengkapan DPD RI .....	42



B. Profil Abdul Gafar Usman .....	44
1. Biografi singkat Abdul Gafar Usman.....	44
2. Daftar riwayat hidup Abdul Gafar Usman .....	47

### **BAB III PENYAJIAN DATA**

A. Strategi komunikasi politik Abdul Gafar Usman .....	51
B. Konstituen Abdul Gafar Usman .....	63
C. Faktor penghambat dan pendukung komunikasi politik Abdul Gafar Usman terhadap konstituen.....	66

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Strategi komunikasi politik Abdul Gafar Usman .....	68
B. Konstituen Abdul Gafar Usman .....	71
C. Faktor penghambat dan pendukung komunikasi politik Abdul Gafar Usman terhadap konstituen.....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran .....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **CURRICULUM VITAE**

## DAFTAR SKEMA

SKEMA	1.1	Tugas anggota DPD RI .....	44
SKEMA	1.2	Tugas dan pokok DPD RI .....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi politik seorang tokoh harus memiliki kredibilitas dan keahlian. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi khalayak tentang sifat-sifat seorang komunikator, sehingga sesungguhnya kredibilitas tidak melekat pada diri komunikator melainkan pada diri komunikan. Namun demikian, kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator yang selanjutnya disebut sebagai komponen kredibilitas. Hovlad dan Wiss menjelaskan bahwa kredibilitas atau ethos itu terdiri dari dua komponen, yaitu keahlian (*experties*) dan dapat dipercaya (*trust worthiness*) oleh khalayak. Sedangkan Keahlian adalah kesan yang terbentuk pada benak khalayak tentang kemampuan politikus, aktivis atau profesional sebagai komunikator politik yang berhubungan dengan topik yang dibicarakan atau ditulis. Politikus, aktivis dan profesional yang mendapat citra diri yang baik sebagai orang yang cerdas, mampu, berakhlak, berpengalaman atau terlatih. Sebaliknya, politikus, aktivis dan profesional yang mendapat citra diri yang rendah, dipandang sebagai orang yang bodoh dan tidak berpengalaman. (Anwar Arifin, 2011:237).

Dalam persaingan perebutan kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia seorang figur yang akan bersaing disamping memiliki kredibilitas dan keahlian juga harus memiliki komunikasi yang bagus untuk mengkampanyekan diri kepada masyarakat. Selain itu Komunikasi sangat

berarti guna membangun kedekatan-kedekatan masyarakat dengan kandidat, maka seorang kandidat harus punya kemampuan melobi agar terpilih sebagai anggota DPD RI. Lalu seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap kandidat maka yang perlu diperhatikan adalah media komunikasi dan model komunikasi yang digunakan.

Dengan sistem pemilihan yang telah berubah diharapkan akan muncul wakil-wakil rakyat yang dekat dengan konstituen di daerah pemilihannya. Perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokratis tengah berlangsung di Indonesia. Pemilu 1999 dan pemilu 2004 telah menghasilkan kepemimpinan baru, lembaga tidak lagi didominasi oleh partai tunggal tetapi ada calon perseorangan atau independen yang mengawal kebijakan-kebijakan sehingga proses pengambilan keputusan berlangsung lebih transparan, bahkan media dapat meliput rapat-rapat anggota legislatif secara langsung dan terbuka. Dengan kondisi seperti itu, masyarakat lebih memahami keberadaan dan kegiatan di lembaga legislatif. Di sisi lain, sebagai wakil rakyat anggota legislatif diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.

Untuk itu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia selama ini menjangkau aspirasi yang berkembang melalui beberapa cara, misalnya penyampaian aspirasi secara langsung di DPD RI, hasil pengumpulan pendapat umum, dan kunjungan ke lapangan. Meski telah menempuh berbagai cara, seringkali keputusan yang diambil oleh DPD belum mampu mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Ini mencerminkan belum

efektifnya informasi yang berasal dari masyarakat sebagai sebuah masukan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan publik.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk maksud tersebut adalah mengefektifkan kegiatan anggota DPD RI selama masa reses melalui dialog-dialog langsung dengan berbagai elemen masyarakat. Belum mapannya sistem politik di Indonesia memang menumbuhkan keyakinan bahwa tidak akan ada sanksi politik secara langsung yang akan didapat oleh para anggota DPD RI.

Sistem pemilihan umum yang masih saja mengedepankan dominasi elit partai politik masih meminggirkan seleksi alamiah para anggota legislatif yang seharusnya terjadi dengan tidak dipilihnya lagi mereka yang tidak mampu memenuhi komitmen politiknya. Pada saat ada tudingan jelas yang disertai data mengenai “rapor merah wakil rakyat” yang merinci nama-nama anggota legislatif yang punya catatan buruk dalam hal kehadiran saja, tidak satupun di antara mereka yang merasa perlu menjelaskan kepada konstituennya mengenai kinerjanya (Kompas, 30-06-2003:08). Permasalahan seperti ini ada karena tidak adanya peraturan yang baku bagaimana seharusnya seorang wakil rakyat melakukan kerjanya dengan baik. Dalam arti kata etika kerja yang kurang baik dari wakil rakyat merupakan dasar bagi rakyat untuk tidak memilihnya kembali pada pemilihan umum selanjutnya.

Dalam UU No. 22 tahun 2003 Pasal 50 disebutkan Anggota DPD RI mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan pada Pasal 50 Huruf h memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih

dan daerah pemilihannya. Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.

Menjadi anggota DPD RI merupakan amanah besar yang di berikan oleh rakyat, oleh karena itu bagi anggota DPD RI reses maupun kunjungan kerja merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat yang diwakili yang harus di jalankan secara maksimal. Kunjungan langsung meninjau kondisi lapangan dan bertemu secara langsung masyarakat dan konstituen untuk menjaring, menampung, menyerap dan kemudian menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Tata tertib DPD RI tahun 2009 bagian kelima menyebutkan kegiatan rapat anggota di daerah antara lain; Paragraf 1 Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, yang diatur dalam Pasal 142 menyatakan : (1) Selain melalui rapat dengar pendapat umum dan melalui kunjungan kerja anggota menerima penyampaian aspirasi masyarakat dan daerah pada saat melakukan kegiatan rapat di daerah yang diwakilinya. (2) Anggota atau perwakilan provinsi yang bersangkutan menyampaikan hasil kegiatan di daerah yang diwakilinya pada sidang paripurna setiap awal masa sidang. (3) Komite (panitia kerja) menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ([www.dpd.go.id/tatib-anggota-dpd-ri](http://www.dpd.go.id/tatib-anggota-dpd-ri) 2009)

Kegiatan untuk menemui pemilih di daerah pemilihan (konstituen) dan datang ke daerah pemilihan dilakukan anggota dewan di masa reses. Dalam masa reses kegiatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

(DPD RI) melakukan serangkaian kegiatan dalam menyerap aspirasi masyarakat secara berkelompok dan perseorangan. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk dialog atau tatap muka antara wakil rakyat dan rakyat. Hal ini akan memperkuat fungsi komunikasi anggota dewan terhadap konstituen di daerah pemilihannya.

Abdul Gafar Usman pada pemilu legislatif 2009 lalu berhasil memuncaki perolehan suara untuk menjadi senator di DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau periode 2009-2014. Mantan anggota DPRD Provinsi Riau ini juga aktif sebagai ketua Yayasan Bustanul Ulum/Pesantren Bustanul Ulum Pekanbaru. Menurutnya untuk kemajuan negeri ini perlu terus dipupuk rasa kebersamaan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta perhatian khusus dalam mendidik anak. (<http://dpd.go.id/blog/abdulgafar-usman/about/>).

Dikutif dari profil singkat Abdul Gafar Usman, banyak yang bisa dikenang dari sosok Abdul Gafar Usman. Dalam berpidato beliau terlihat seperti motivator. Bahasa serta logika yang digunakannya sangat sederhana sehingga mudah dicerna semua kalangan. Disamping itu, Abdul Gafar Usman juga intens turun ke daerah. Masa kerja ke daerah Riau dimanfaatkan untuk mengunjungi masyarakat di akar rumput. Aspirasi masyarakat ditangani dengan 3S (Serap, Sampaikan dan Selesaikan).

Abdul Gafar Usman merupakan tokoh masyarakat Riau yang ikut andil dalam pembangunan sumberdaya manusia di Riau, mantan Kepala Kantor Departemen Agama ini juga pernah menjabat sebagai ketua DPD KNPI Riau

dan pernah berpidato di PBB sebagai mewakili pemuda Indonesia. Banyak hasil karya yang sudah diperbuat sehingga masyarakat Riau mempercayakan dia sebagai perwakilannya sebagai Anggota DPD RI periode 2009-2014.

Maka, dalam hal ini penulis mengambil salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2009-2014 daerah pemilihan Riau dalam melakukan proses-proses komunikasi dengan konstituennya baik itu melalui kunjungan (reses), maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Namun apakah hal yang dilakukannya telah sesuai dengan aturan yang baku seperti apa komunikasi politik hendaknya dilakukan oleh anggota DPD RI terhadap konstituen di daerah pemilihannya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan kunjungan kerja ke daerah pemilihan apakah hanya sebatas melepas kewajiban. Maka dengan memperhatikan beberapa hal dalam latar belakang masalah, maka penulis mengangkat penelitian skripsi ini dengan judul *“Strategi Komunikasi Politik Abdul Gafar Usman Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Riau Periode 2009-2014 Terhadap Konstituennya Di Provinsi Riau”*.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dan alasan bagi penulis untuk meneliti judul ini adalah:

1. Komunikasi Politik yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah



pemilihan Riau periode 2009-2014 diharapkan memberikan kontribusi kepada konstituennya.

2. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena penulis ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik Abdul Gafar Usman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Riau periode 2009-2014 terhadap konstituennya.
3. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya buat penulis dan umumnya buat pembaca.
4. Dari segi waktu dan biaya menurut pertimbangan penulis dapat dilaksanakan.

### **C. Penegasan Istilah**

#### **1. Strategi**

Salusu menjelaskan bahwa strategi adalah seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang *efektif* dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Sedangkan menurut Arifin strategi adalah suatu bentuk keseluruhan keputusan yang bersifat kondisional pada saat tindakan yang akan dijalankan guna untuk mencapai tujuan politik pada masa depan. (Anwar Arifin, 2003: 145). Kemudian Onong juga mengatakan bahwa strategi adalah Perencanaan (*Planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. (Effendy, 2004: 29).

## 2. Komunikasi

Menurut *Bernard Berelson dan Gary A. Stayner* menjelaskan bahwa komunikasi merupakan *transmisi informasi*, gagasan, emosi dan keterampilan dengan menggunakan simbol-Simbol, figur atau kata-kata.

Sedangkan menurut *Everett M. Rogers* mengatakan bahwa komunikasi adalah proses pengalihan ide dan sumber kepada penerima dengan tujuan mengubah tingkah laku. Dan dua pemaknaan tentang komunikasi diatas dapat kita katakan bahwa komunikasi merupakan menyampaikan gagasan *transmisi informasi* kepada halayak dengan tujuan merubah sikap, cara pandang dan tindakan *individu* maupun *public*.

(Mulyana, 2004: 62).

## 3. Politik

*Lasswell* (1963) merumuskan bahwa politik adalah siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana caranya (*who, gets what, when, how*).

Sedangkan *Weinstein*, (1977) menyebutkan bahwa politik sebagai pembagian nilai-nilai bagi yang berwenang, kekuasaan dan yang memegang kekuasaan. (Arifin : 2003 : 1-2).

## 4. Abdul Gafar Usman

Abdul Gafar Usman pada pemilu legislatif 2009 lalu berhasil memuncaki perolehan suara untuk menjadi Senator di DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau periode 2009-2014. Mantan anggota DPRD Provinsi Riau ini juga aktif sebagai ketua Yayasan Bustanul Ulum/Pesantren Bustanul Ulum Pekanbaru. Menurutnya untuk kemajuan negeri ini perlu terus

dipupuk rasa kebersamaan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.  
(<http://dpd.go.id/blog/abdulgafarusman/about/>).

#### 5. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah anggota legislasi dari jalur perseorangan non partai politik yang di percayakan oleh konstituen untuk menjadi perwakilan dari setiap propinsi, anggota DPD berjumlah 4 (empat) orang atau jumlah anggota DPD RI tidak lebih dari 1/3 anggota DPR (UU No. 22 Tahun 2003 Pasal 33). Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD), sebelum 2004 disebut utusan daerah yang merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Tugas dan wewenang DPD, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK, bidang terkait : Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah; Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); Pajak, pendidikan, dan agama  
(<http://dpd.go.id/profil/fungsi-tugas-wewenang/>).

## 6. Daerah Pemilihan

Daerah pemilihan adalah batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.

(<http://www.pemiluindonesia.com/kamus>)

## 7. Konstituen

Konstituen adalah orang-orang yang merupakan pemilih pada pemilihan yang berlangsung pada suatu daerah. Konstituen adalah orang yang telah memenuhi syarat untuk ikut dalam suatu pemilihan umum yang dilakukan oleh negara dalam rangka partisipasinya terhadap negara. Yang mempunyai hak memilih dalam pemilu yaitu warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih, yaitu : nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Andrea Harefa, 2004).

Konstituen adalah seseorang yang secara aktif mengambil bagian dalam proses menjalankan organisasi dan yang memberikan otoritas kepada orang lain untuk bertindak mewakili dirinya. Seorang konstituen memberikan otoritas kepada pemimpin, bukan sebaliknya. Konstituen itu bisa pegawai/bawahan, tetapi juga bisa konsumen, para pemegang saham,

para pemasok, dan mitra bisnis lainnya, dan warga negara, demikian Kouzes dan Posner. (Credibility, 1993).

#### **D. Permasalahan**

##### **1. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana strategi komunikasi politik Abdul Gafar Usman selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2009-2014 daerah pemilihan Riau terhadap konstituennya di provinsi Riau?
- b. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat komunikasi politik yang dihadapi Abdul Gafar Usman selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2009-2014 terhadap konstituennya di provinsi Riau?

##### **2. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya masalah-masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini, untuk memudahkan dan lebih terarahnya penelitian, penulis memfokuskan pada strategi komunikasi politik Abdul Gafar Usman selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2009-2014 dalam pembinaan konstituennya di provinsi Riau. Artinya penulis lebih memberi pola strategi apa yang dilakukan Abdul Gafar Usman anggota DPD RI dapil Riau melalui tinjauan strategi komunikasi politik terhadap konstituennya di provinsi Riau.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Abdul Gafar Usman anggota DPD RI Dapil Riau terhadap konstituennya di provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam komunikasi politik yang dihadapi oleh Abdul Gafar Usman selaku anggota DPD RI dapil Riau terhadap konstituennya di Riau.

### 2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada berbagai kalangan seperti kalangan akademisi khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang tertarik tentang kinerja dari anggota dewan perwakilan daerah.
- b. Secara praktis dapat memberikan pemahaman kepada anggota dewan perwakilan daerah untuk meningkatkan tanggungjawabnya terhadap masyarakat, khususnya pada konstituen di daerah pemilihannya.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional**

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Kerangka Teoritis Strategi Komunikasi Politik

##### 1) Defenisi Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategia* yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata

strategia bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratos* (tentara) dan kata *agein* (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai awal industrialisasi (Schroder, 2008). Kemudian istilah strategi tersebut meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi, politik dan komunikasi politik. Hal itu penting dalam upaya memenangkan kompetisi dalam pemilihan umum dan dalam pengambilan keputusan politik lainnya. Pada hakikatnya strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan masa depan. (Anwar Arifin, 2011:235-236).

Dari pengertian diatas strategi merupakan suatu yang perlu dijadikan *prioritas* utama dalam melakukan tindakan yang menyangkut suatu kepentingan terhadap publik. Kemudian strategi merupakan cara untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka tujuan tidak akan mudah tercapai tanpa strategi, karena pada intinya segala tindakan dan perbuatan tidak terlepas dari strategi.

Dalam pembentukan suatu strategi sering dipengaruhi oleh unsur-unsur tertentu yang berkaitan dengan lingkungan, kondisi, visi atau arah atau tujuan seperti :

- a. Secara makro, lingkungan dan organisasi kepartaian akan dipengaruhi oleh unsur-unsur kebijakan umum, budaya yang

dianut, sistem perekonomian dan teknologi yang dikuasai oleh partai atau organisasi yang bersangkutan.

- b. Secara mikro, tergantung dan misi partai atau organisasi serta sumber-sumber yang dimiliki, sistem pengorganisasian dan rencana atau program dalam jangka pendek atau jangka panjang serta tujuan sasaran yang hendak dicapai. (Rosady, 2003: 117)

## 2) Defenisi Komunikasi Politik

Menurut Nimmo Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenal dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) untuk bertukar citra dengan menggunakan simbol-simbol. Jadi defenisi komunikasi merupakan pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan. Sementara politik adalah siapa memperoleh apa, kapan dan bagaiman, dan politik dapat diasumsikan sesuatu yang mengarah pada proses mempertahankan dan memperluas tindakannya.

Komunikasi politik diasumsikan sebagai yang menjadikan sistem politik itu hidup dan dinamis. Komunikasi politik mempersembahkan semua kegiatan sistem politik, baik masa kini maupun masa lampau, sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan. Kesimpulan tersebut berangkat dari suatu pemikiran bahwa komunikasi adalah suatu proses yang menyatu dengan gejala politik. (Alfian, 1993:79)



Dalam defenisi *Alfian* diatas, komunikasi politik bersifat fleksibel yang bergerak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, sehingga baik masa lalu, sekarang maupun akan datang politik tidak dapat dihindarkan lagi dari sistem pemerintahan. Akhirnya segenap potensi masyarakat yang memiliki sifat konstruktif terhadap pembangunan politik dapat dialihkan menjadi suatu kebijaksanaan.

Demikian pentingnya suatu komunikasi politik sebagai landasan dalam menjalankan perhelatan politik di tanah air yang berkonsep pada persatuan dan kesatuan yang utuh sebagai modal kearah pembangunan yang merata dan spritual. Sehingga keberadaan komunikasi politik bagi bangsa ini sangat dibutuhkan terutama dalam membentuk susunan tata kerja yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak menimbulkan kontradiksi ditengah-tengah masyarakat.

Jadi komunikasi politik merupakan suatu proses, tindakan yang melibatkan juga pembicaraan yang bersifat inklusif yang berarti segala cara orang bertukar simbol, kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, sikap tubuh dan pikiran.

### 3) Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus merupakan keputusan strategis yang tepat

bagi komunikator politik. (Anwar Arifin). Berdasarkan konsep teori strategi komunikasi politik yang didefinisikan oleh Anwar Afirin diatas, maka dapat penulis uraikan sebagai berikut :

a. Ketokohan dan Kelembagaan

Langkah pertama dalam strategi komunikasi politik ialah merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya, ketokohan seseorang politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam komunikasi politik. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih media politik yang tepat.

Ketika komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan pesan politik, melainkan siapa tokoh politik (politikus) dan dari lembaga mana yang menyampaikan pesan politik tersebut.

1) Merawat ketokohan

Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas (*al amin*), daya tarik, dan kekuasaan, yang oleh Rakhmat (2005) dengan menghormati Aristoteles, menyebutkan sebagai ethos. Dengan kata lain, ketokohan sama dengan ethos, yaitu gabungan antara kredibilitas, atraksi dan kekuasaan. Orang memiliki

ketokohan menurut Nimmo (2000:182) dapat juga disebut sebagai pahlawan politik.

Kedibilitas adalah seperangkat persepsi khalayak tentang sifat-sifat komunikator, sehingga sesungguhnya kedibilitas tidak melekat dalam kredibilitas berkenan dengan sifat-sifat komunikator yang selanjutnya disebut sebagai komponen kredibilitas. Hovland dan Wiss menjelaskan bahwa kredibilitas atau ethos itu terdiri dari dua komponen, yaitu keahlian (expertise) dan dapat dipercaya (trust worthiness) oleh khalayak. (Rakhmad, 2005:256)

Secara sederhana dapat digambarkan secara ringkas bahwa kredibilitas komunikator politik itu tergantung pada (1) kemampuan dan keahlian mengenai pesan-pesan yang akan disampaikan; dan (2) kemampuan dan keterampilan dalam menyajikan pesan-pesan dalam arti memilih tema, metode, dan media politik yang sesuai dengan kondisi khalayak/masyarakatnya.

Ketokohan dalam politik kemudian melahirkan kepahlawanan politik dan kharisma diperoleh secara kredibilitas, yaitu dapat dipercaya karena karakter dan moralitas yang terpuji dalam pergaulan ditengah masyarakat. Kepercayaan itu tumbuh juga karena ada keahlian atau kemampuan dan keterampilan dalam menyampaikan substansi pesan yang dikuasainya.

Keahlian diperoleh dalam waktu yang lama melalui proses pembelajaran atau pendidikan formal maupun informal.

Ketokohan dalam politik dapat juga terbangun melalui daya tarik fisik tubuh, busana, dukungan fisik lainnya, yang bersifat nonverbal dalam komunikasi. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa laki-laki yang tampan dan wanita yang cantik, memiliki daya tarik tersendiri sebagai komunikator politik yang efektif. Demikian juga faktor suara yang merdu bagi perempuan atau serak-serak basah bagi laki-laki, sangat kuat persuasifnya bagi khalayak. Hal itu dicakup dalam *paradigma pramatis* dalam komunikasi politik (Anwar Arifin ; 2011:239)

Seorang komunikator politik juga harus membangun kebersamaan dengan khalayak, guna untuk mempermudah interaksi dan akan menimbulkan efek yang positif. Oleh karena itu upaya untuk merawat ketokohan, maka menciptakan kebersamaan itu harus terus diupayakan.

Keakraban atau hubungan baik antara komunikator politik dan khalayak, merupakan hal yang penting dalam proses dan efektifitas komunikasi politik. Keakraban ini bisa dicapai jika komunikator dengan khalayak dapat terjadi jika antara komunikator dan khalayak banyak persamaan, terutama dalam hal nilai-nilai, pendidikan, status dan sebagainya. Persamaan antara komunikator dan khalayak seperti ini, oleh Rogers dan

Shoemaker (1997), disebut dengan istilah homofili. Sebaliknya jika komunikator dan khalayak terdapat banyak perbedaan, disebut dengan istilah heterofili.

Kini dapat disimpulkan bahwa komunikator yang mampu mempengaruhi khalayak adalah komunikator yang memiliki ketokohan dan kepemimpinan (leadership) dengan memiliki keseluruhan syarat yang telah dikemukakan diatas.

## 2) Memantapkan kelembagaan

Selain memelihara ketokohan, langkah strategis dan pertama yang harus dilakukan ialah memantapkan kelembagaan atau membesarkan lembaga. Hal ini sangat penting sebagai faktor mendasar dalam komunikasi politik, terutama yang berkaitan dengan kampanye dan pemberian suara dalam pemilihan umum.

Telah disinggung sebelumnya bahwa ketokohan seorang politikus, aktivis, atau profesional akan meningkat jika ia dukung oleh lembaga yang ternama, atau berkiprah dalam lembaga tersebut. Jadi, lembaga merupakan sebuah kekuatan yang besar dalam membantu proses komunikasi politik yang efektif.

Publik sangat menghargai lembaga yang dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Justru itu, persepsi publik terhadap citra lembaga sangat ditentukan oleh kegunaan lembaga itu bagi masyarakat. Makin tinggi kegunaan lembaga

itu bagi publik, maka lembaga tersebut akan semakin diperlukan oleh publik atau masyarakat.

Ketokohan yang prima dan lembaga politik yang besar dan terpercaya akan menjadi kekuatan politik tersendiri dalam membangun komunikasi politik yang efektif. Artinya, kandidat yang maju dalam pemilihan umum akan dicari oleh rakyat, sebagai pahlawan politik, yang pantas menduduki jabatan-jabatan politik yang sedang diperebutkan.

b. Menciptakan Kebersamaan.

Langkah strategis kedua yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi politik adalah menciptakan kebersamaan antara politikus dan khalayak (rakyat) dengan cara mengenal khalayak.

Dalam menciptakan kebersamaan dengan masyarakat, maka seorang figur politik harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Memahami khalayak

Komunikasi politik yang ditujukan kepada khalayak (rakyat) selalu dinilai atas isi pesan yang disampaikan oleh komunikator politik. Maka menurut Lasswell dalam Arifin (1980:114), terdapat tiga bentuk pengaruh dalam memahami khalayak, yaitu (1) *attention area*, (2) *public area*, dan (3) *sentimen area*.

*Attention area* merupakan bidang dimana perhatian individu indetik dengan masyarakat. Kendatipun bidang perhatian ini

dipengaruhi oleh pengalaman sendiri, tetapi yang mengambil pokok persoalan adalah bagaimana seseorang mengambil tindakan terhadap suatu persoalan yang sama atau berbeda dengan tindakan masyarakat.

*Public area* adalah bidang yang memberi pengaruh terhadap seseorang karena adanya keterikatan psikologis yang amat kuat antara kelompok dan individu. Dengan keterikatan ini seseorang merasa sangat terikat oleh kelompok sehingga ia tidak suka menyeleweng dari tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang mengikat kelompok itu.

Selanjutnya, *sentimen area* sesuatu yang dalam diri seseorang terdapat ikatan-ikatan yang sangat sukar untuk dijelaskan dan hanya dirasakan kebenarannya saja. Justru itu, *sentimen area* ini adalah merupakan bidang yang lebih besar pengaruhnya terhadap diri seseorang.

## 2) Menyusun pesan persuasif.

Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam menyusun pesan politik yang bersifat persuasif, adalah menentukan tema dan materi yang sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak adalah mampu membangkitkan perhatian.

Syarat-syarat untuk berhasilnya sebuah pesan menurut Wilbur Schramm (1995), yaitu (1) pesan harus direncanakan dan

disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat menarik perhatian khalayak; (2) pesan haruslah menggunakan tanda-tanda yang sudah dikenal oleh komunikator dan khalayak sehingga kedua pengertian itu bertemu; (3) pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi daripada sasaran dan menyarankan agar cara-cara tersebut dapat mencapai kebutuhan itu; dan (4) pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi khalayak.

### 3) Menetapkan metode.

Metode yang cocok dipakai dalam komunikasi politik adalah metode informatif, yaitu suatu bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan cara (metode) memberikan penerangan. Artinya, menyampaikan suatu pesan yang sesuai dengan fakta-fakta, data dan pendapat-pendapat yang benar. Penerangan mempunyai fungsi (1) memberikan informasi tentang fakta semata-mata, juga fakta yang bersifat kontroversial; atau (2) memberikan informasi atau menuntun khalayak ke arah suatu pendapat.

Metode lain yang sangat penting dalam komunikasi politik ialah metode persuasif yaitu mempengaruhi khalayak dengan cara *membujuk*. Dalam hal ini khalayak akan dibuka jalan pikirannya, dan terutama perasaannya.



Selain itu, dikenal juga metode edukatif, sebagai salah satu usaha untuk mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan politik yang dilontarkan, yang dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat, fakta, dan pengalaman. metode ini juga disebut sebagai metode mendidik, yang memberikan suatu gagasan kepada khalayak berdasarkan fakta, pendapat dan pengalaman yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam strategi komunikasi politik, memilih metode yang yang tepat, sangat tergantung pada kondisi dan situasi khalayak. Pada dasarnya semua metode penyampaian atau cara mempengaruhi orang lain itu masing-masing dapat digunakan sesuai kondisi khalayak. Metode yang disebutkan diatas dapat saja digunakan secara bersama-sama sehingga kekurangan yang satu dapat ditutupi oleh yang lain.

#### 4) Menentukan Media.

Penggunaan media dalam komunikasi politik perlu dipilih dengan cermat untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi khalayak. Hal ini sangat penting setelah mengenal khalayak untuk menyusun pesan dan menetapkan metode.

Adapun contoh media yang dapat digunakan dalam komunikasi politik yaitu media yang dapat dilihat oleh mata saja (*visual media*) seperti surat kabar, majalah, poster, dan spanduk serta media yang dapat didengar saja (*the auditive media*) seperti

radio, telepon, sirine dan gendang. Selain itu, terdapat juga media yang dapat ditangkap oleh mata dan telinga sekaligus dan bahkan kelihatan hidup (*audio-visual media*), seperti film dan televisi, serta media interaktif melalui jaringan komputer (*internet*) atau yang disebut *cyber media*.

Penggunaan salah satu diantara semua media diatas tergantung pada kebutuhan atau kemampuan khalayak menerima dan mencerna pesan-pesan politik yang akan disampaikan. Jadi, seleksi media didasarkan pada kemampuan, kebutuhan, dan kepentingan serta lokasi khalayak yang dijadikan sasaran komunikasi politik. Apalagi, setia media memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Seleksi penggunaan media untuk komunikasi politik, hanya dapat dilakukan terhadap media yang dapat dikendalikan atau dikontrol oleh komunikator politik

c. Membangun Konsensus.

(1) Seni berkompromi

Dalam konsensus, seorang komunikator politik harus memiliki kemampuan berkompromi, yang merupakan suatu seni tersendiri. Seni atau kita berkompromi itu pada umumnya merupakan bakat atau bawaan lahir dan pasti dimiliki oleh seorang komunikator. Bakat itu harus terus dikembangkan sehingga kemampuan membangun konsensus semakin matang.

(2) Bersedia membuka diri

Menciptakan suasana yang baik dalam berkomunikasi seorang komunikator politik harus bersedia membuka dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya. Konsep diri yang negatif, selalu berfikir negatif dan peka terhadap kritik, cepat marah atau emosional, bersikap *hipokritis* dan cenderung merasa tidak disenangi orang lain, serta bersikap pesimistis dan tidak berani bersaing secara sehat karena selalu merasa tidak percaya diri. Justru itu orang yang memiliki konsep diri yang negatif dan tidak dapat melahirkan kehangatan serta keakraban dalam pergaulan, sehingga sukar menjadi politikus dan pelobi yang baik.

Jika konsep diri sesuai dengan pengalaman sendiri, maka ia akan lebih terbuka untuk menerima gagasan baru dari orang lain, dan cenderung menghindari sikap defensif dan lebih cermat memandang diri sendiri dan orang lain, sehingga lebih mudah membangun konsensus.

Ada beberapa faktor yang mendorong lahirnya kesediaan membuka diri, yakni adanya persamaan karakteristik personal, daya tarik fisik, kedekatan dan kemampuan. Hasil studi menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki persamaan karakteristik personal, seperti kesamaan nilai-nilai, sikap,

keyakinan, tingkat sosio ekonomi, agama, ideologi cenderung saling menyukai.

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa untuk membangun konsensus, harus dimulai dengan kesediaan membuka diri sehingga dapat mengembangkan seni berkompromi. Itulah salah satu strategi dasar yang perlu difahami dan diamalkan bagi orang yang akan menjadi politikus atau politikus yang ingin sukses dalam melakukan komunikasi politik.

b. Kerangka Teoritis Konstituen.

Konstituen adalah warga negara yang diwakili oleh seorang legislator yang terpilih dalam pemilu (NDI; 2008:6). Bagian dari kerja seorang legislator dalam demokrasi adalah melayani konstituen dengan mewakili kepentingan mereka dalam lembaga legislatif dan menyediakan hubungan langsung dengan pemerintah.

Konstituen adalah orang-orang yang merupakan pemilih/pemberi suara pada pemilihan yang berlangsung pada suatu daerah. Konstituen adalah orang yang telah memenuhi syarat untuk ikut dalam suatu pemilihan umum yang dilakukan oleh negara dalam rangka partisipasinya terhadap negara. Yang mempunyai hak memilih dalam pemilu yaitu warga negara republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Syarat

untuk dapat didaftar sebagai pemilih, yaitu : nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Andrea Harefa, 2004).

Menurut kaukus parlemen bersih DIY (2006), konstituen bagi anggota dewan adalah “*seluruh warga di daerah pemilihan, darimana dia dipilih dalam proses pemilihan umum, tanpa lagi mengidentifikasi siapa pendukung dan penolaknya*”. Pendukung setiap anggota dewan merupakan konstituen utama, tetapi warga lain bukan pendukung tentunya tidak bisa diabaikan. Pemilihan umum bukanlah arena untuk mengidentifikasi siapa yang memilih dan menolak kandidat anggota parlemen, tetapi ia sebagai bentuk “kontrak politik” antara warga dengan kandidat di suatu daerah pemilihan. Siapapun pemenang dalam proses elektoral itu, harus mengakar, menerima mandat, mewakili dan bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi warga (konstituen) di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Menurut Grindle (1991), warga masyarakat sebagai konstituen bukanlah entitas yang tunggal, tetapi beragam dan tersegmentasi menurut garis profesi, kelas, kelompok, kepentingan dan lain-lain. Segmentasi tersebut dapat digolongkan menjadi :

- a) *Segmen akademisi*: diluar pagar pemerintah: mempunyai idealisme, teori dan keahlian dalam memahami seluk beluk

kebijakan. Pendekatan dengan segmen ini menjadi sangat penting terutama sebagai mitra dalam perumusan kebijakan.

- b) *Segmen mahasiswa*: dalam era reformasi, dianggap sebagai agen pendorong perubahan. Ciri khas segmen ini sangat kritis pada kebijakan parlemen dan pemerintah. Memahami segmen ini harus dengan orientasi terbuka.
- c) *Segmen aktivis LSM*: sangat jelas keberpihakannya pada rakyat, mendorong adanya proses partisipasi maksimal, yaitu rakyat aktif, kritis, terorganisir dan menentukan kebijakan. Partisipasi bagi segmen ini adalah esensi dasar demokrasi dan pemberdayaan, yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan lebih terkontrol dan akuntabel.
- d) *Segmen kelompok-kelompok masyarakat miskin*: sangat rentan menjadi korban kebijakan yang salah dan jauh dari proses-proses politik parlemen dan partai. Segmen ini mempunyai masalah dengan kemiskinan nyata, mereka adalah petani, nelayan, buruh, pedagang, tukang becak, pemulung dll.
- e) *Segmen orang desa*: terdiri dari kepala desa, perangkat desa, maupun elite desa. Segmen ini sangat peka dan sering bersuara menghadapi kebijakan yang mengatur pemerintahan desa. Segmen ini dipentingkan oleh partai pada saat pemilihan umum, karena dianggap dapat mengerahkan massa.

- f) *Segmen organisasi masyarakat*: mempunyai kekuatan konstituen yang jelas dan besar, berorientasi pada kaderisasi dan pendidikan kedalam untuk anggotanya. Segmen ini biasanya sudah beraliansi dengan partai, terutama dalam era reformasi, dimana banyak partai muncul atau terbentuk dari organisasi masyarakat dengan jumlah anggota cukup besar.
- g) *Segmen warga atau rakyat biasa*: tidak tergabung dalam institusi politik, kelompok sosial atau organisasi masyarakat apapun. Jumlah segmen ini paling besar dibandingkan segmen-segmen lainnya, namun tidak secara sistematis dan terorganisir dalam merespon isu-isu publik. Bahkan dapat dikatakan bahwa warga biasa tidak mempunyai perhatian atau kompetensi memadai terhadap kebijakan publik, walaupun hampir setiap kebijakan publik berdampak langsung kepada mereka.
- h) *Segmen media massa*: Media merupakan ruang publik terbuka dan aksesibel bagi pemerintah dan segmen masyarakat. Sebagai ruang publik, segmen ini adalah wadah paling memungkinkan opini atau kritik segmen lain terungkap ke publik.

## 2. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi penjelasan terhadap konsep teori. Maka, untuk menjadi tolak ukur dalam penulisan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyusunan

skripsi, disini penulis membuat konsep operasional yaitu, strategi komunikasi politik dan pembinaan konstituen.

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya strategi komunikasi politik yang dilancarkan Abdul Gafar Usman dalam pembinaan konstituennya di provinsi Riau, maka dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

#### 1. Strategi Komunikasi Politik

- a. Komunikasi Politik Abdul Gafar Usman dilakukan dengan cara merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus.
- b. Menentukan media dalam komunikasi politik harus sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak, misalnya media yang dapat dilihat oleh mata saja (*visual media*) seperti surat kabar, majalah, poster dan spanduk, serta media yang dapat didengar (*the auditive media*) seperti radio, telepon, sirine dan gendang. Selain itu terdapat juga media yang ditangkap oleh mata dan telinga bahkan kelihatan hidup (*audio visual media*), seperti televisi, serta media interaktif melalui jaringan komputer (internet) atau yang disebut *ciber media*.
- c. Melakukan komunikasi secara persuasif adalah syarat utama untuk mempengaruhi khalayak dan mampu membangkitkan perhatian.



## 2. Konstituen

- a. Terwujudnya masyarakat/kelompok masyarakat yang menerapkan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Masyarakat paham akan fungsi dan wewenang DPD RI.
- c. Masyarakat/kelompok masyarakat ikut andil dalam menjalankan program DPD RI.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metodologi kualitatif mempunyai tujuan utama memberikan gagasan, wawasan dan pemahaman atas situasi permasalahan yang dihadapi oleh peneliti. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Data deskriptif yang ingin dihasilkan adalah data mengenai bentuk-bentuk komunikasi politik, topik agenda permasalahan pada kegiatan yang dilakukan Abdul Gafar Usman anggota DPD RI daerah pemilihan Riau. Peneliti akan melihat kinerja Abdul Gafar Usman Anggota DPD RI daerah pemilihan Riau dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukannya yang berupa partisipasi dalam bentuk dialog, serta menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI baik itu kantor DPD RI yang berada di Jakarta dan kantor DPD RI di Riau, Lokasi ini dipilih karena penulis menganggap kantor tersebut sebagai tempat aktifitas Abdul Gafar Usman anggota dewan perwakilan daerah republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Riau, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan wawancara.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah Abdul Gafar Usman anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Riau. Sedangkan objek penelitian adalah strategi komunikasi politik Abdul Gafar Usman anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Riau periode 2009-2014 dalam pembinaan konstituennya di provinsi Riau.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari informan yang akan diwawancarai dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu : pengambilan sampel berdasarkan tujuan. Dalam metode ini informan yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan

data dan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (Sukandarrumidi, 2004 : 65).

Dalam penelitian kualitatif tidak mempermasalahkan jumlah informan. Prosedur pemilihan informan adalah menentukan informan kunci (*key informan*) yaitu Abdul Gafar Usman dan masyarakat yang menjadi pengonsumsi informasi, atau situasi sosial tertentu dengan syarat informasi sesuai dengan apa yang menjadi focus dalam penelitian. Apabila dalam proses pengumpulan data nantinya sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari informan baru, proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai. Dengan demikian penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informannya, karena jumlah informan dapat diambil dengan jumlah sedikit ataupun dengan jumlah yang banyak. Hal itu bergantung pada tepat atau tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas serta keragaman fenomena sosial yang diteliti. (Bungin, 2003 : 53).

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, antara lain mengenai tanggapan narasumber tentang data-data maupun informasi yang diperlukan. Dalam hal ini data dapat diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan atau narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi seperti studi pustaka, studi literature, buku-buku, dan dokumen-dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data lazimnya menggunakan observasi dan wawancara, juga tidak diabaikan menggunakan sumber-sumber non manusia seperti dokumen dan catatan, adapun teknik pengumpulan datanya sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan beberapa kegiatan reses (kunjungan) yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman. Tujuannya menghubungkan data yang didapatkan pada saat wawancara dengan kegiatan yang dilakukan Abdul Gafar Usman selaku anggota DPD RI, sehingga menghasilkan data yang terbukti kebenarannya.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada yang diwawancarai untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui proses komunikasi dan berhadapan muka sehingga dapat memberikan keterangan pada peneliti. Dalam penelitian ini didapatkan data dari wawancara berupa data lisan yang berupa penjelasan mengenai strategi komunikasi

politik yang digunakan pada pemilihan umum periode 2009-2014. Untuk lebih jelasnya informan yang akan diwawancarai antara lain Abdul Gafar Usman anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Riau serta para perwakilan konstituennya Abdul Gafar Usman anggota DPD RI Dapil Riau yang penulis tentukan nantinya.

c. Sumber lain-lain

Sumber yang merupakan pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Sumber itu berupa dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi bisa juga melalui internet. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya oleh peneliti.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata guna mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Data-data yang akan dianalisis nantinya adalah data-data yang didapatkan dari proses wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sebagai bentuk gambaran dari penulisan skripsi ini maka penulisan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang
- B. Alasan pemilihan judul
- C. Penegasan istilah
- D. Permasalahan
- E. Tujuan dan kegunaan penelitian
- F. Kerangka teoritis dan konsep operasional
- G. Metode penelitian
- H. Sistematika penulisan

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

- A. Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
- B. Profil Abdul Gafar Usman

### **BAB III : PENYAJIAN DATA**

- A. Strategi komunikasi politik Abdul Gafar Usman
- B. Konstituen Abdul Gafar Usman
- C. Faktor penghambat dan pendukung komunikasi politik Abdul Gafar Usman terhadap konstituen

**BAB IV : ANALISA DATA**

- A. Strategi komunikasi politik Abdul Gafar Usman
- B. Konstituen Abdul Gafar Usman
- C. Faktor penghambat dan pendukung komunikasi politik  
Abdul Gafar Usman terhadap konstituen

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**CURRICULUM VITAE**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

##### 1. Pendahuluan

Konsensus politik bangsa Indonesia melalui reformasi 1998 telah menghasilkan reformasi tata pemerintahan negara republik Indonesia yang dituangkan dalam amandemen UUD 1945. Diharapkan selanjutnya perubahan sistem terjadi melalui tata laksana pemerintahan, baik melalui aktualisasi *check and balance* antar cabang kekuasaan, prinsip desentralisasi dan implementasi *good governance* ataupun tekad untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Prinsip *check and balance* antar cabang kekuasaan negara dan di dalam cabang kekuasaan legislatif sendiri dibangun dengan keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001. Kelahiran lembaga Dewan Perwakilan Daerah merupakan peningkatan dari lembaga utusan daerah dan golongan dalam struktur lembaga MPR RI sebelumnya, dengan menempatkan sebagai lembaga Negara yang anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai salah satu prinsip demokrasi. (Profil DPD RI Tahun Sidang 2012-2013, 2012 : 7)



## 2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD RI

DPD RI merupakan lembaga legislatif dalam sistem tata negara Republik Indonesia. Pertama kali dibentuk pada tahun 2004 dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) orang wakil yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan konstitusi, jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR, DPD merupakan parlemen nasional yang mewakili daerah dan bersidang di ibu kota negara. Dalam menjalankan tugasnya, DPD memiliki kantor di setiap provinsi dalam kerangka menampung aspirasi masyarakat dan daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam konstitusi (pasal 22 D, UUD 1945) fungsi, tugas dan wewenang DPD yang terdapat dalam buku Profil DPD RI tahun sidang 2012-2013 adalah sebagai berikut :

- a) DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- b) DPD ikut membahas rancangan undang-undang dengan DPR.

DPD ikut membahas rancangan undang-undang dengan DPR ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,

pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

c) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR.

Pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Serta memberikan pendapat kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.

d) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

### 3. Visi dan Misi DPD RI

#### Visi DPD RI

“Terwujudnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga legislatif dalam sistem tata negara Indonesia yang kuat dan efektif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah menuju masyarakat Indonesia yang bermartabat, berkesetaraan,

berkeadilan, dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia”.

#### Misi DPD RI

- a) Memperjuangkan penataan sistem ketatanegaraan untuk memperkuat sistem *check and balances* melalui perubahan tahap ke-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI dalam mengajukan usul, ikut membahas, memberikan pertimbangan undang-undang tertentu, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang;
- c) Memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan bangsa;
- d) Meningkatkan sinergi dan interaksi serta kerjasama anggota DPD RI dengan para pemangku kepentingan untuk efektifitas perjuangan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional;
- e) Mendorong pemerintah pusat untuk memberi perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu penting dan strategis di daerah;
- f) Mendorong pemerintah daerah mengidentifikasi dan menyusun strategi dalam mengatasi isu-isu dan persoalan penting di daerah;
- g) Meningkatkan kinerja politik Anggota DPD RI melalui *institutional building, capacity building, dan image building*;

- h) Melakukan sosialisasi DPD RI melalui berbagai terobosan kegiatan yang terprogram tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Alat Kelengkapan DPD RI

Dalam menjalankan tugasnya DPD memiliki alat kelengkapan sebagai berikut :

- a) *Pimpinan* merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif-kolegial. Pimpinan terdiri dari satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dan oleh anggota dalam Sidang Paripurna.
- b) *Panitia Musyawarah (Panmus)* merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. Sebagai pimpinan Panmus adalah pimpinan DPD RI. Panmus bertugas merancang dan menetapkan program dan arah kebijakan DPD.
- c) *Komite I DPD* membidangi otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah serta antar-daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pemukiman dan kependudukan; pertanahan dan tata ruang; serta politik, hukum, dan hak asasi manusia (HAM).
- d) *Komite II DPD* membidangi pertanian dan perkebunan; perhubungan; kelautan dan perikanan; energi dan sumber daya mineral; kehutanan dan lingkungan hidup; pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal; perindustrian dan perdagangan; penanaman modal; dan pekerjaan umum.

- e) *Komite III DPD* membidangi pendidikan; agama; kebudayaan; kesehatan; pariwisata; pemuda dan olahraga; kesejahteraan sosial; pemberdayaan perempuan dan ketenagakerjaan.
- f) *Komite IV DPD* membidangi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); pajak; perimbangan keuangan pusat dan daerah; lembaga keuangan; dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
- g) *Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)* merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap, bertugas menyiapkan rancangan undang-undang inisiatif DPD yang akan disampaikan kepada DPR.
- h) *Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)* merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap, yang bertugas membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan kerumah tanggaan DPD, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal.
- i) *Badan Kehormatan (BK)* merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap, yang bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota DPD. Selain itu BK juga bertugas untuk mengevaluasi dan menyempurnakan peraturan DPD tentang tata tertib dan kode etik.
- j) *Panitia Akuntabilitas Publik (PAP)* merupakan alat kelengkapan DPD, yang bertugas melakukan penelaahan lanjutan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada DPD.

- k) *Panitia Hubungan Antar-Lembaga (PHAL)* merupakan alat kelengkapan DPD, yang bertugas membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD dengan lembaga sejenis, lembaga pemerintah, maupun non-pemerintah, baik secara bilateral maupun multilateral.
- l) *Pimpinan Kelompok DPD di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)* sebagai alat kelengkapan MPR adalah bagian integral dan DPD yang merupakan pengelompokan anggota sebagai anggota MPR.

## 5. Tugas Anggota DPD RI

Skema 1.1 Tugas anggota DPD RI  
(Sumber : [www.dpd.go.id](http://www.dpd.go.id))



## B. Profil Abdul Gafar Usman

### 1. Biografi Singkat Abdul Gafar Usman

Siapa sangka, anak petani yang sederhana ini, kini menjadi salah seorang senator asal Riau yang duduk di Senayan. Hampir satu periode Abdul Gafar Usman mewakili rakyat, mewakili teritorial dan mewakili

Riau untuk berbicara di kancah nasional. Untuk sampai ke situ, jalan panjang telah dilalui pria kelahiran Kampung Kapur, Air Tiris, Kampar, 63 tahun silam itu. Anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan almarhum Usman dan Drama Taksiah ini, sejak kecil memang telah menunjukkan kelebihanannya.

Dia suka membaca biografi orang-orang besar, berharap suatu saat bisa pula menjadi tokoh yang bermanfaat bagi keluarga, daerah dan bangsanya. Seperti kisah orang-orang sukses lainnya, perjalanan hidup Abdul Gafar Usman, juga tak selalu mulus. Banyak onak dan duri serta asam garam kehidupan. Hal itu pula yang membuatnya kaya dengan ilmu dan pengalaman.

Perjalan hidup yang panjang banyak sekali tantangan dan rintangannya, sehingga banyak profesi yang sudah dilakoni Abdul Gafar Usman. Pada tahun 1971, dia mendapat SK PNS dari Departemen Agama sebagai guru agama Sekolah Dasar. Karir Abdul Gafar Usman terus menanjak. Dari guru agama SD, lalu menjadi guru agama SMP hingga ditarik ke Kanwil Depatemen Agama Riau. Semenjak duduk di Departemen Agama Riau, karir Abdul Gafar Usman terbilang mulus. Mulai dari menjabat sebagai Kepala Seksi, lalu menjadi Kepala Kantor Departemen Agama di Inhil, Hingga sampai ke puncak karir, yaitu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Depag Riau. Disamping berkarir sebagai PNS di Departemen Agama Riau, Abdul Gafar Usman juga terus menimba ilmu dan pengalaman. Sambil bekerja, gelar sarjana diraihnya dari fakultas

Tarbiyah IAIN Susqa Pekanbaru. Sedangkan gelar masternya diraihinya di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Disamping itu, berbagai pendidikan kilat, kursus dan pelatihan juga telah memperkaya khazanah keilmuan yang dimiliki Abdul Gafar Usman.

Abdul Gafar Usman adalah seorang organisatoris. Sudah tak terbilang jumlah organisasi yang dipimpinnya. Yang paling berkesan dan menunjang karirnya serta melambungkan namanya pada waktu itu adalah KNPI dan Golkar. Maklum, sebelum reformasi, PNS bisa bebas berpolitik. Di KNPI Riau Abdul Gafar Usman pernah menjadi ketua. Dari organisasi pemuda itu pula Abdul Gafar Usman pernah diutus menjadi salah seorang pemuda Indonesia yang berbicara di sidang PBB. Sedangkan aktif di Golkar, membawa Abdul Gafar Usman duduk di kursi legislatif Riau selama dua periode.

Banyak yang bisa dikenang dari sosok Abdul Gafar Usman. Jika anda pernah mendengarnya berpidato, tentulah anda takkan melewatkan kata demi kata yang disampaikannya. Maklum, dia memang seorang orator, da'i, serta motivator. Bahasa serta logika yang digunakannya sangat sederhana sehingga mudah dicerna semua kalangan.

Bukan itu saja, dia juga dikenal banyak akal dan tak pernah tinggal diam. Meski usianya sudah berkepala enam, namun semangat untuk memperjuangkan Riau tak pernah kendor. Buktinya, segera setelah dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Gafar Usman sudah membuat gebrakan. Soal krisis listrik yang menjadi



masalah besar di Riau, ditanganinya dengan baik dengan mengundang berbagai pihak ke DPD RI. Demikian juga soal Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Riau yang belum dibayar oleh pusat. Menteri Keuangan yang pada waktu itu dijabat Sri Mulyani dibawanya ke Riau, sehingga hutang DBH tersebut terbayarkan dengan segera.

Disamping itu, Abdul Gafar Usman juga intens turun ke daerah. Masa kerja ke daerah Riau dimanfaatkan untuk mengunjungi masyarakat di akar rumput, menambung aspirasi kata beliau harus ditangani dengan 3S (Serap, Sampaikan dan Selesaikan).

## 2. Daftar Riwayat Hidup Abdul Gafar Usman

Nama Lengkap : Drs. H. Abd Gafar Usman, M.Sc

Tempat /Tanggal Lahir : Air Tiris - Kampar, 10 juni 1950

Pekerjaan Sekarang : Anggota DPD RI

Jenis Kelamin : Laki – laki

Agama : Islam

Alamat Tempat Tinggal : Jl. Emasari No. 06 Tangkerang Selatan

Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru-Riau

### a) Keluarga

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat/Tgl Lahir	Pekerjaan	Hubungan Keluarga
1	2	3	4	5	6
1	Hj. Asnidar	Perempuan	Terantau Panjang/ 5 April 1954	Ibu Rumah Tangga	Istri
2	Gestina Yulita	Perempuan	Pekanbaru/ 09 Juli 1954	Ibu rumah tangga	Anak Kandung
3	Fitri Yani	Perempuan	Pekanbaru/ 16 Februari 1977	PNS	Anak kandung
4	Uirda Fitri	Perempuan	Pekanbaru/ 11 mei 1989	Pelajar	Anak Kandung
5	Rahmat Riau Putra	Laki-laki	Pekanbaru	Pelajar	Anak Kandung

## b) Orang Tua

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Pekerjaan	Hubungan Keluarga
1	2	3	4	5
1	H. Usman	-	Almarhum	Ayah Kandung
2	Hj. Drama Taksiah	-	Ibu Rumah Tangga	Ibu Kandung

## c) Saudara-saudara

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Pekerjaan	Hubungan Keluarga
1	2	3	4	5
1	M. Nasir	Air Tiris	-	Kakak kandung
2	Hj. Sumarni	AIR TIRIS	PNS	Kakak Kandung
3	Yusdarni	Air Tiris	Ibu Rumah Tangga	Adik Kandung
4	Drs.H. Zulher MS	Air Tiris	PNS	Adik Kandung
5	Nurainas	Air Tiris	PNS	Adik Kandung
6	Ir. Repanis	Air Tiris	PNS	Adik Kandung

## d) Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan/ Kursus/Latihan	Tahun	Ijazah/Sertifikat	Tempat
1	2	3	4	5
1	Sekolah Dasar	1962	Ijazah	Air Tiris
2	PGAN 4 Tahun	1966	Ijazah	Pekanbaru
3	PGAN 6 Tahun	1968	Ijazah	Pekanbaru
4	Serjana Muda IAIN Susqo Fak syari'ah	1976	Ijazah	Pekanbaru
5	P4 Tipe A	1980	Piagam	Pekanbaru
6	MAS PPMTI Tanjung Berulak Air Tiris Kampar	1980	Ijazah	Kampar
7	Sarjana IAIN Susqo Fak Terbiah	1981	Ijazah	Pekanbaru
8	Latihan Pembina Pemuda	1981	Piagam	Jakarta
9	Pendidikan manajemen	1981	Sertifikat	Jakarta
10	Penataan Kasi Penais	1983	Sertifikat	Padang
11	Latihan kelompok Penggerak Lapangan	1984	Piagam	Pekanbaru
12	TARPATNAS	1984	Piagam	Jakarta
13	Pelatihan Auudit Lingkungan	1990	Piagam	Solo
14	Latihan Analisis peningkatan PAD	1994	Piagam	Jogyakarta
15	SPAMA	1995-1996	Sttpl	Pekanbaru
16	SPAMEN	1996-1997	Sttpl	Jakarta
17	Sekolah Tinggi manajemen LABORA	2001	Ijazah	Jakarta

## e) Riwayat dalam Kehidupan Organisasi

No	Organisasi	Tahun	Jabatan	Tempat	Pimpinan
1	2	3	4	5	6
1	KOPRI	1971	Anggota	Pekanbaru	H.M. Yunus Hz, BA
2	SEMA Fak. Syari'ah IAIN Susqa	1973-1974	Ketua	Pekanbaru	Abd. Gafar Usman
3	DEMA IAIN Susqa	1975-1976	Ketua	Pekanbaru	Abd. Gafar Usman
4	DPM IAIN Susqa	1977-1978	Ketua	Pekanbaru	Abd. Gafar Usman
5	KNPI TK. I Riau	1985-1986	Ketua	Pekanbaru	Abd. Gafar Usman
6	FKP. DPRD TK. I Riau	1987-1992	Sekretaris	Pekanbaru	Drs. Darwis Rida
7	MKGR TK. I Riau	1996-2001	Wakil Ketua	Pekanbaru	Syafril Harun
8	PHBI TK. I Riau	1992-1997	Sekretaris	Pekanbaru	H. Ansor Murat, SH
9	Komisi B DPRD Riau	1992	Ketua	Pekanbaru	Drs. H. Darwis Rida
10	Yayasan Tuanaku Tambusai	1992	Pengurus	Pekanbaru	Prof. DR Amir Lutfhi
11	DPD I Golkar Riau	1997	Wakil Ketua	Pekanbaru	Drs. H Darwis Rida
12	Yayasan Bustanul Ulum	1998- Sekarang	Ketua	Pekanbaru	Drs. H Abd Gafar Usman M
13	Puskopontren Riau	2000- Sekarang	Ketua	Pekanbaru	Drs. H Abd Gafar Usman MM
14	PTQ Riau	2001- Sekarang	Ketua Harian	Pekanbaru	
15	Yayasan Umathan Wasathan Pesantren Teknologi Riau (PTR)	2003- Sekarang	Ketua Harian	Pekanbaru	Drs. H Arsyat Rahim

## f) Riwayat Pekerjaan / Jabatan

No	Pekerjaan/Jabatan	Tahun	Instansi Induk	Pimpinan
1	2	3	4	5
1	Guru PGA AL Islam Jakarta	1969-1971	Yayasan Al Islam	
2	Guru Agama SD	1971-1976	Kandepag Kota Pekanbaru	Arsyat Yatim, BA
3	Guru Agama SMP	1978-1980	Kanwil Depag Propinsi Riau	Ismail Maki
4	PPA Resri VI Sail	1980-1982	Kanwil Depag Propinsi Riau	Ismail Maki

5	Kasi Penais Kandepag kota Pekanbaru	1982-1985	Kandepag Kota Pekanbaru	Bakri K, BA
6	Ka Kandepag Kota Inhil	1985-1986	Kanwil Depag Propinsi Riau	Drs H Ishak Manani
7	Pengawas kenais Kanwil Depag Propinsi Riau	1986-1988	Kanwil Depag Propinsi Riau	Drs H Ishak Manani
8	Purek III UNILAK	1987-1989	Yayasan Ali Haji	Drs Bakri Ali
9	Pudek III STIQ Pekanbaru	1995- sekarang	STIQ Pekanbaru	Drs H Arifin DS
10	Pengawas Penais Kanwil depag Propinsi Riau	1986-1988	Kanwil Depag Propinsi Riau	Drs H Ishak Manani
11	Anggota DPRD Propinsi riau	1987-1997	DPRD Propinsi Riau	Drs H Darwis Rida
12	Kabid Penais Kanwil depag Propinsi Riau	1988-2001	Kanwil Depag Propinsi Riau	Drs H Rasyid Hamidi
13	Ka kanwil depag Propinsi Riau	2001-2009	Kanwil Deppag Propinsi Riau	Drs Abd Gafar Usmman M.Sc
14	Anggota DPD/MPR RI			

## g) Riwayat Seminar/ Lokakarya/ Simposium

No	Nama Kegiatan	Tempat	Penyelenggara	Tanggal
1	2	3	4	5
1	Seminar Taraf hidup nelayan	Pekanbaru	KNPN TK I Riau	1975
2	Loka karya Kemahasiswaan	Banjarmasin	Depag RI	1977
3	Seminar dakwah	Kualalumpur	UKM Malaysia	1978
4	Diskusi Panel	Pekanbaru	KNPN TK I Riau	1981
5	Penatar PAREKTERDES	Kampar- Pekanbaru	Golkar TK I Riau	1987
6	Pansus DPRD Riau	Pekanbaru	DPRD TK I Riau	1988
7	Ansus Pola dasar Pembangunan Riau	Pekanbaru	DPRD TK I Riau	1988
8	Penatar P4	Pekanbaru	Pemda TK I Riau / BP 7	1988

## h) Piagam / Penghargaan

No	Dari	Kegiatan	Tanggal
1	2	3	4
1	IAIN SUSQO Pekanbaru	Mahasiswa Teladan	1974
2	Depag RI	Lomba Mengarang Perguruan Tinggi Se Riau	1974
3	Asean Eksekutif Development Golden Award 2003	Prestasi Anak Bangsa	2003
4	Presiden RI	Setia Lencana Karya setya 30 tahun	2005

Sumber : Dokumentasi Pribadi Abdul Gafar Usman

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA**

Dalam bab ini disajikan data yang berhasil dihimpun dari penelitian dilokasi, tentang hal-hal yang berhubungan dengan “Strategi Komunikasi Politik Abdul Gafar Usman Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Riau Periode 2009-2014 terhadap Konstituennya di Provinsi Riau”.

Data yang dihimpun melalui dokumen-dokumen kegiatan Abdul Gafar Usman (Anggota DPD RI Dapil Riau), wawancara langsung dengan nara sumber yaitu Abdul Gafar Usman guna mendapatkan gambaran tentang Strategi Komunikasi Politik Abdul Gafar Usman (Anggota DPD RI Dapil Riau) periode 2009-2014.

#### **A. Strategi Komunikasi Politik Abdul Gafar Usman**

Menurut Abdul Gafar Usman (Anggota DPD RI dapil Riau), dalam hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2013, strategi komunikasi politik terhadap konstituen memiliki banyak cara dan metode yang dilakukan, yaitu :

##### **1) Komunikasi Langsung**

Dalam menampung aspirasi konstituen di provinsi Riau Abdul Gafar Usman melakukan komunikasi langsung dengan konstituen yaitu menampung aspirasi konstituen ketika melaksanakan kegiatan reses/kunjungan ke berbagai daerah, baik itu dalam bentuk diskusi antar

personal, organisasi, ceramah dan sosialisasi. Abdul Gafar Usman selalu menerima tamunya diwaktu-waktu tertentu baik itu dirumahnya maupun di kantornya.

*“Saya siap ditemui oleh siapapun untuk menampung Aspirasi-  
aspirasi masyarakat/konstituen”*

Adapun bentuk komunikasi langsung yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman sebagai berikut :

a. Reses atau kunjungan

Reses atau kunjungan adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman selaku anggota DPD RI, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun. Kegiatan ini bertujuan untuk menerima informasi dari konstituen/masyarakat Riau untuk pembangunan daerah Riau. Kegiatan reses dilakukan untuk kepentingan daerah, melaksanakan kunjungan ke pemerintah provinsi, kabupaten sampai ke tingkat lurah/desa serta organisasi-organisasi masyarakat.

b. Kegiatan sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi adalah kegiatan menyampaikan tentang kelembagaan DPD RI, sosialisasi masalah konstitusi negara (Pancasila, UUD 1945). Kegiatan ini dilakukan berdasarkan permintaan organisasi masyarakat/pemerintah serta dapat juga dilakukan bersamaan dengan kegiatan reses.

c. Silaturahmi dengan organisasi masyarakat

Silaturahmi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman (anggota DPD RI) baik itu secara kelembagaan ataupun personal. Secara kelembagaan misalnya menghadiri undangan acara-acara yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat lainnya. Kegiatan ini selain untuk bersilaturahmi juga untuk pendekatan dengan masyarakat.

Komunikasi secara langsung ini sering dilakukan oleh Abdul Gafar Usman, karena dalam menampung aspirasi yang datang dari masyarakat Abdul Gafar Usman menggunakan metode 3S (Sampaikan, Serap dan Selesaikan). Abdul Gafar Usman juga sering memberikan ruang diskusi secara terbuka kepada konstituen, makanya beliau sangat senang ketika diundang oleh masyarakat untuk ceramah dan diskusi

2) Komunikasi media massa

Komunikasi media massa yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman, yaitu mensosialisasi program-program DPD RI di media massa agar masyarakat mengetahui program, fungsi dan wewenang DPD RI. Media massa yang digunakan untuk komunikasi tersebut yaitu media elektronik (RTV, TVRI, RRI, TVOne, dll), media cetak (Riau Pos, Haluan Riau, Azam, dll).

Abdul Gafar Usman juga membuka komunikasi melalui webnya yaitu, [www.dpd.go.id/blog/abdulgafarusman](http://www.dpd.go.id/blog/abdulgafarusman), melalui telepon (pribadi dan kantor), email, faks.

### 3) Komunikasi vertikal dan horizontal

Komunikasi vertikal dan horizontal adalah komunikasi yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman dalam menyelesaikan aspirasi dari konstituennya. Komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga yang berada di pusat untuk memperjuangkan kepentingan daerah serta melakukan pendekatan dengan lembaga tinggi negara baik secara lembaga maupun personal.

Komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, mulai dari Gubernur sampai ke tingkat lurah/kepala desa (eksekutif) serta dengan DPRD I, DPRD II dan Badan Perwakilan Desa (legislatif). Selain itu juga melakukan pertemuan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat.

Selain melakukan komunikasi vertikal dan horizontal, Abdul Gafar Usman juga melakukan komunikasi vertikal dan horizontal secara bersamaan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Riau, misalnya persoalan Pemilu 2011 yang lalu, Abdul Gafar Usman dengan anggota DPD RI asal Riau yang lainnya mempertemukan antara Gubernur Riau, Pj. Walikota Pekanbaru, KPU Riau, KPU Pekanbaru dengan lembaga-lembaga di pusat seperti Menteri Dalam Negeri terkait persoalan Pemilu 2011 tersebut.

Ada hal yang menarik yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman, selain komunikasi vertikal dan horizontal, yaitu melakukan komunikasi



dan pertemuan-pertemuan secara internasional serta perwakilan-perwakilan negara sahabat untuk memperjuangkan kepentingan Riau dan Indonesia.

4) Pemberdayaan staf kantor dan korda

Hasil Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2013, Abdul Gafar Usman mengatakan bahwa melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan konstituen agar aspirasi konstituen tersebut bisa segera diselesaikan serta disampaikan dengan cepat, maka untuk mempermudah hal tersebut Abdul Gafar Usman mengangkat Staff (Kantor DPD RI Jakarta dan Kantor DPD RI Pekanbaru) serta membentuk Koordinator Daerah (Korda) disetiap Kabupaten/Kota di Riau. Hal ini dilakukan dengan tujuan, yaitu :

- a) Aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat perlu diawasi dengan cara langsung dan memberikan respon
- b) Menginventarisir semua persoalan masyarakat yang menjadi tugas, pokok dan fungsi DPD RI.
- c) Melakukan komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan terhadap masyarakat untuk kemajuan masyarakat tersebut.

Adapun nama-nama Staf dan Korda Abdul Gafar Usman (Anggota DPD RI Dapil Riau) dalam membantuk kinerjanya sebagai berikut :

a) Staf Ahli Kantor Jakarta

1. Tenaga Ahli : Melur Mediana, S.Ap
2. Asisten : Mahyudi, S.Ag

## b) Staf Ahli Kantor Pekanbaru

1. Tenaga Ahli : Zainul Azis, S.Ag  
: Rasa'at, S.Ag

## c) Koordinator Daerah Kab/Kota Se Riau

1. Kampar : Syamsudin
2. Pekanbaru : Tarmizi Muhammad
3. Rokan Hulu : Zailani
4. Rokan Hilir : Rahmanyus
5. Siak : Bukhori
6. Meranti : Muradhol
7. Dumai : Syahrul Aidi
8. Bengkalis : KH. Nurhadi
9. Indragiri Hulu : Zulkifli Gani
10. Indragiri Hilir : Azis
11. Kuantan Singingi : H. Jumlis
12. Pelalawan : Muhammad

## 5) Mekanisme Penyelesaian Aspirasi dan Pembahasan.

Wawancara yang dilakukan dengan Abdul Gafar Usman pada tanggal 10 Januari 2012 setiap anggota DPD RI mempunyai tugas untuk menyelesaikan aspirasi yang datang dari masyarakat. Untuk itu dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan aspirasi yang datang dari

masyarakat Riau Abdul Gafar Usman melakukan bentuk Komunikasi sebagai berikut :

a) Komunikasi Administrasi (Data dan Fakta)

Komunikasi Administrasi adalah berkaitan dengan surat menyurat, persoalan yang terjadi dalam masyarakat harus mempunyai data dan fakta secara tertulis.

b) Komunikasi Struktural

Komunikasi struktural adalah mengkomunikasikan persoalan yang terjadi dimasyarakat dengan struktur kebijakan yang bertugas.

c) Komunikasi Fungsional

Komunikasi fungsional ialah mengkomunikasikan persoalan kepada orang yang memegang bagian-bagian fungsi persoalan yang akan diselesaikan.

d) Komunikasi personal

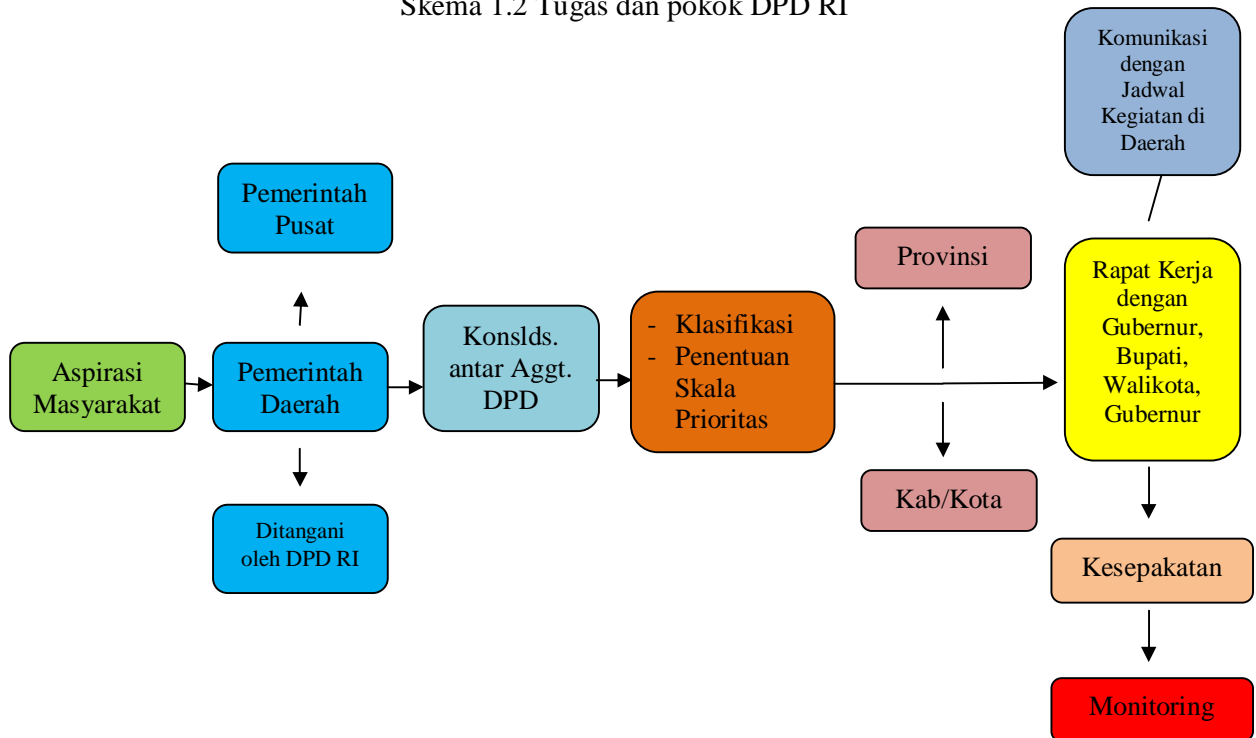
Komunikasi personal adalah menjalin komunikasi secara personal atau pendekatan kepada orang yang memegang peran tentang penyelesaian pokok persoalan yang akan disampaikan atau diselesaikan.

e) Komunikasi Politik

Komunikasi Politik adalah melakukan komunikasi secara politik terhadap orang yang mempunyai kepentingan terhadap persoalan yang akan disampaikan.

Adapun mekanisme penyelesaian dan pembahasan aspirasi yang menjadi tugas dan pokok DPD RI terdapat pada gambar sebagai berikut :

Skema 1.2 Tugas dan pokok DPD RI



(Sumber : Dokumentasi Kantor DPD RI Riau, Jakarta)

Abdul Gafar Usman juga melakukan komunikasi dengan anggota DPD RI daerah pemilihan Riau lainnya dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelembagaan serta dalam menampung dan menyelesaikan aspirasi yang datang dari masyarakat. Maka strategi komunikasi yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman dengan anggota DPD RI daerah pemilihan Riau lainnya, sebagai berikut :

- a) Membentuk forum DPD untuk Riau, forum ini bertujuan untuk koordinasi antar anggota DPD Riau dalam menyelesaikan persoalan

Riau. Forum ini diketuai oleh Hj. Maimanah Umar, Sekretaris Abdul Gafar Usman, serta Anggota Muhammad Gazali dan Intsiawati Ayus.

- b) Melakukan rapat berkala dengan anggota DPD RI Riau lainnya setiap minggu.
- c) Saling memberikan informasi tentang persoal-persoalan yang disampaikan oleh masyarakat serta diselesaikan secara bersama.
- d) Melaksanakan kunjungan/reses secara bersama.
- e) Melakukan koordinasi administrasi kelembagaan secara bersama.
- f) Setiap ada konstituen yang menyampaikan aspirasi diutamakan diterima secara bersama.
- g) Setiap staf ahli anggota DPD RI ditugaskan untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi dengan yang lainnya dalam mendeteksi dan memformulasikan persoalan yang datang dari masyarakat.

Banyak sekali tanggapan yang diberikan oleh para konstituen Abdul Gafar Usman tentang sosok Abdul Gafar Usman. Abdul Gafar Usman memiliki strategi yang berbeda-beda dalam berkomunikasi dengan konstituennya. Abdul Gafar Usman seorang yang disukai oleh para ulama, terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya banyak dibuat dikalangan ulama, sebagaimana wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak M. Zein Arif selaku Pengurus Satkar Ulama Riau pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 bertempat di Kediannya Jl. Taman Karya Pekanbaru, bahwa Abdul Gafar Usman adalah sosok yang baik dan potensial, memiliki

kemampuan yang sangat dekat dengan masyarakat. Dahulunya beliau seorang birokrat (mantan Kandepag Riau) dan juga seorang ulama. Beliau juga seorang politisi pernah duduk menjadi anggota DPRD Riau. Abdul Gafar Usman sewaktu mudanya pernah pemimpin organisasi pemuda (KNPI Riau), beliau pernah mengharumkan nama Pemuda Indonesia di dunia dengan berpidato di PBB dulunya. Sosok Abdul Gafar Usman sangat dekat dengan ulama dan masyarakat.

Dalam mensosialisasikan program-program DPD RI Abdul Gafar Usman memiliki strategi yang sangat baik, sehingga setiap apa yang dibuatnya berkaitan dengan kegiatan DPD RI selalu mendapat sambutan yang baik di masyarakat. Karena dia seorang senator yang paling aktif dibandingkan dengan senator yang lainnya, mau menemui masyarakat selagi beliau ada di Riau.

Hal yang sama juga dikatakan oleh pimpinan redaksi pelaksana media Azam Pekanbaru yaitu Bapak Zainul Aziz, pada wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 08 Maret 2013 bertempat di Kantor Media Azam Jalan Parit Indah Kompleks Grand Sudirman Pekanbaru. Abdul Gafar Usman dalam mensosialisasikan program DPD RI menggunakan strategi dengan memberdayakan jaringan-jaringan yang ada, seperti jaringan di Departemen Agama dulu, jaringan kepemudaan, mahasiswa dan jaringan pedesaan.

Abdul Gafar Usman juga memakai media dalam mensosialisasikan kegiatan-kegiatannya. Dia menganggap bahwa peran media sangat besar dalam mensosialisasikan program-program DPD RI. Abdul Gafar Usman

lebih sering muncul daripada senator-senator lainnya di media cetak atau media elektronik. Abdul Gafar Usman merasa rugi jika kegiatan yang dilakukannya tidak diketahui oleh masyarakat. Oleh sebab itu Abdul Gafar Usman memanfaatkan peran media.

Abdul Gafar Usman seorang sosok yang dekat juga dengan para petani dengan mengunjungi petani-petani di desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Zainullah seorang pengurus kelompok tani di desa Balam Jaya Kec. Tambang pada tanggal 08 Maret 2013 di kediamannya, dia berharap Bapak Abdul Gafar Usman, hendaknya selalu memperhatikan masyarakat walaupun nantinya tidak duduk lagi di DPD RI, selalu menyampaikan aspirasi rakyat biasa dan menyampaikan aspirasi tentang bantuan permodalan untuk para petani di desa-desa.

Banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang telah dibuatnya untuk daerah Riau, seperti yang penulis kutip dari berbagai media Abdul Gafar Usman selalu memperhatikan masalah-masalah daerah, sebagai yang dimuat dalam Media Riau Wicara Edisi 64/Th III/2012. Bahwa Abdul Gafar Usman anggota DPD RI Asal Riau serius menangani dan memperhatikan masalah Warga Pulau Padang. Abdul Gafar Usman berjanji akan memfasilitasi penyelesaian tuntutan 18 dari 82 dari Warga Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, yang melakukan aksi jahit mulut di depan gedung MPR RI, Jakarta.

Pada Hari Pagi Riau Pos Edisi Senin, 27 Februari 2012. Abdul Gafar Usman memperhatikan masalah tanah ulayat di Kuantan Singingi. Abdul

Gafar Usman menerima aspirasi dari masyarakat Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, masyarakat tersebut ingin mengelola sekitar 3.500 hektar tanah yang diklaim sebagai tanah ulayat.

Pada Dunia Pendidikan Abdul Gafar Usman mendukung pendirian Perguruan Tinggi, terlihat pada pernyataan beliau pada [www.riaupos.com](http://www.riaupos.com) edisi 11 April 2012-18:54 Wib, beliau mengatakan AKMR perlu didukung secara bersama untuk ditingkatkan menjadi Perguruan Tinggi, karena di Riau hanya AKMR yang menggeluti masalah kesenian.

Dalam memberantas tindak penyelewengan keuangan daerah Abdul Gafar Usman mempergunakan Komite IV DPD RI, karena Abdul Gafar Usman juga sebagai anggota komite IV DPD RI tersebut. Bahwa dia bertekad akan menyelesaikan temuan BPK RI pada penyelewengan anggaran pada satker di pemprop tahun 2012. Ini dinyatakan pada Harian Haluan Riau Edisi Rabu, 5 Desember 2012. Abdul Gafar Usman memperhatikan masalah daerah ini dengan serius, supaya Riau ini bebas dari tindakan korupsi.

Dengan figur yang terbuka inilah Bapak Abdul Gafar Usman disukai oleh para para intelektual (mahasiswa). Sosok pemimpin yang terbuka dan selalu memperhatikan keinginan masyarakat khususnya mahasiswa. Demikian dikatakan oleh Ardi Amsyar Presiden Universitas Muhammadiyah Riau pada tanggal 09 Maret 2013 di Sekretariat BEM Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru.

Ardi Amsyar menjelaskan bahwa Bapak Abdul Gafar Usman selalu membuat kegiatan-kegiatan dengan Pemuda atau Mahasiswa. kegiatan



sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang pernah beliau lakukan dengan BEM UMRI menurut saya sangat bagus, menumbuhkan cinta terhadap negara Indonesia bagi generasi muda.

Saya selaku mahasiswa mempunyai harapan kepada Abdul Gafar Usman, agar beliau selalu membela kepentingan rayat. Terhadap lembaga DPD RI saya mempunyai harapan agar lembaga ini mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pembela kepentingan masyarakat, jadikan lembaga ini lembaga yang bersih dan terhindar dari perbuatan korupsi.

Pada wawancara di Sekretariat KNPI Riau pada tanggal 12 Maret 2013, Toni Wediansyah selaku Plt. Ketua DPD KNPI Riau mengatakan bahwa Abdul Gafar Usman merupakan sosok yang peduli dengan Pemuda Riau, dia sangat energik dan tanggap dengan persoalan Riau terutama persoalan pemuda, kedepan diharapkan lahir figur-figur seperti Abdul Gafar Usman untuk membangun daerah yang kita cintai ini. Masa yang akan datang kita harapkan lembaga DPD RI tetap menjadi lembaga independen menjadi penyalur aspirasi masyarakat yang lebih bagus.

## **B. Konstituen Abdul Gafar Usman**

### **1) Pembagian Konstituen**

Wawancara khusus yang dilakukan dengan Abdul Gafar Usman pada tanggal 10 Januari 2013 bahwa beliau telah membagi kelompok konstituennya di Provinsi Riau, sebagai berikut :

a) Kelompok Formal.

Kelompok Formal ini adalah organisasi-organisasi pemerintah atau non pemerintah yang terdaftar secara hukum.

b) Kelompok Non Formal.

Kelompok Non Formal adalah sekumpulan masyarakat yang membuat kumpulan-kumpulan tersendiri, misalnya kelompok tani, kelompok usaha, klub-klub seniman, olahraga dan lain sebagainya.

c) Kelompok Struktural.

Kelompok Struktural adalah kelompok masyarakat (pemuda, mahasiswa, dll) yang tergabung kedalam organisasi struktural yang mempunyai kepengurusan secara nasional.

d) Kelompok Kultural.

Kelompok Kultural adalah kelompok-kelompok paguyuban atau kedaearah yang mempunyai budaya, misalnya perkumpulan melayu, batak, jawa, dan sebagainya.

Dari kelompok konstituen yang telah dijelaskan diatas, Abdul Gafar Usman dalam berkomunikasi dengan konstituennya ada kelompok-kelompok yang menjadi prioritas utamanya, yaitu :

- a) Kelompok Pemuda dan Mahasiswa
- b) Kelompok-Kelompok Tani
- c) Kelompok Pedagang
- d) Kelompok Seni, Adat, Ninik Mamak dan Agama.\

## 2) Harapan kepada Konstituen

Abdul Gafar Usman seorang Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Riau periode 2009-2014, maka berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 18 Januari 2013 Abdul Gafar secara pribadi dan kelembagaan beliau mempunyai harapan kepada konstituen, yaitu :

- a) Meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara.
- b) Tumbuhnya masyarakat yang mempunyai kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- c) Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan baik secara personal, kelompok baik itu secara vertikal dan horizontal.
- d) Pro aktif menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi baik itu dipemerintah ataupun dalam masyarakat.
- e) Mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama dan Pancasila secara berkelanjutan.
- f) Bagi generasi muda, menjadi contoh suri taulan dalam masyarakat dan melaksanakan kegiatan yang dianggap baik dan benar menurut norma-norma.
- g) Meningkatnya kesejahteraan hidup dan meningkatkan kemudahan dalam pelayanan masyarakat.
- h) Ikut bertanggung jawab dalam pencapaian visi Riau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau yang agamis, lahir dan bathin.

### **C. Faktor Penghambat dan Pendukung Komunikasi Politik Abdul Gafar Usman terhadap konstituen**

Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Abdul Gafar Usman dalam melakukan komunikasi politik terhadap konstituennya.

Faktor Penghambat, yaitu :

1. Abdul Gafar Usman memiliki hambatan seperti yang disampaikan oleh Pimpinan Redaksi Pelaksana Media Azam (pada wawancara tanggal 08 Maret 2013), bahwa keterbatasan lembaga DPD RI yang tidak sama fungsi dan wewenangnya dengan lembaga DPR RI menjadi menghambat terhadap proses komunikasi politik. DPD RI kedepannya menjadi menyeimbang di legislatif, mempunyai kewenangan yang sama dengan DPR. Mudah-mudahan untuk hal ini kedepan adanya amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang lembaga DPD RI ini lebih lanjut.
2. Ardi Amsyar (Presiden BEM UMRI) mengatakan bahwa Abdul Gafar Usman mempunyai hambatan dalam mensosialisasikan programnya, yaitu masyarakat belum seluruhnya memahami apa itu lembaga DPD RI, karena lembaga ini lembaga yang baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
3. M. Zein Arif (Pengurus Satkar Ulama Riau) mengatakan bahwa Minimnya anggaran untuk membantu langsung kegiatan partisipasi untuk masyarakat menjadi faktor penghambat Abdul Gafar Usman dalam menjalin komunikasi dengan konstituennya, serta kurangnya

waktu untuk berada di daerah, sehingga kedepan harus ada kantor khusus (kantor DPD RI) di Riau, sehingga anggota DPD RI mempunyai keterbatasan untuk menampung aspirasi yang masuk, kedepan pemerintah diharapkan membuat yang namanya “Rumah Aspirasi”

Faktor Pendukung, yaitu :

1. Abdul Gafar Usman mempergunakan media sebagai tempat sarana untuk menyampaikan program-program DPD RI, seperti media televisi, cetak dan elektronik dan media komunikasi online (blog, web, telpon seluler dan sebagainya).
2. Abdul Gafar Usman diberikan fasilitas oleh negara untuk melakukan komunikasi dengan konstituennya. Baik itu sarana dan prasarana dan anggaran untuk reses (hal ini dikatakan oleh redaktur pelaksana media Azam).
3. Dari Biografi Pribadi yang penulis baca, bahwa Abdul Gafar Usman sudah memiliki jaringan untuk berkomunikasi dengan konstituennya, seperti jaringan sewaktu dia menjadi Kandepag Riau, pernah menjabat ketua KNPI Riau dan Ketua DEMMA UIN Suska Riau serta banyak sekali organisasi yang pernah ia geluti, hal ini menjadi faktor pendukung untuk melakukan komunikasi dengan konstituennya di Riau.

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

Dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian yang telah penulis tuangkan pada bab tiga dengan mencoba memberikan interpretasi atau pemahaman terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Upaya ini didasarkan pada persepsi bahwa tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman makna atas realitas yang terjadi. Bersamaan dengan langkah ini penulis juga berusaha melakukan analisis sehingga hasil penelitian lebih bermakna.

Penafsiran ini mengacu kepada landasan teori dan menggunakan pendekatan analisis secara mendalam. Sistematika analisisnya berdasarkan kepada hasil penelitian yang diurutkan sesuai dengan permasalahan.

#### **A. Strategi Komunikasi Politik Abdul Gafar Usman**

Dalam latar belakang yang penulis kemukakan berdasarkan hasil wawancara, bahwa keberadaan lembaga DPD RI berdasarkan latar belakang keelahirannya tidak lain adalah keberadaan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan sebagaimana diatur pasal 2 ayat (1) UUD 1945. (Subardjo ; 2011 : 137)

DPD RI tidak mempunyai kewenangan yang sama dengan DPR RI walaupun berada dalam satu wadah MPR RI. Menurut Subardjo dalam bukunya berjudul DPD menurut undang-undang dasar negara republik

Indonesia tahun 1945 dan penerapan sistem bikameral dalam lembaga perwakilan Indonesia, menyebutkan bahwa DPD ikut membahas bersama DPR atau RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dan pusat yang diajukan oleh pemerintah atau inisiatif DPD. DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan RUU.

Dalam UU No. 22 Tahun 2003 pasal 50 disebutkan anggota DPD RI mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan pada pasal 50 huruf h memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.

Maka berdasarkan referensi wacana diatas strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman sudah terformat dan tersusun secara baik. Secara tidak langsung Abdul Gafar Usman telah menciptakan komunikasi politik yang mampu menjalankan tugas dan fungsi DPD RI. komunikasi yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman telah menarik berbagai elemen masyarakat. Terlihat dari kunjungan atau reses yang dilaksanakan dalam tiga kali setahun serta menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh konstituennya di Riau. Banyak sekali program yang sudah terlaksana berdasarkan tugas pokok serta fungsi DPD itu sendiri.

Abdul Gafar Usman membuat rancangan strategi komunikasi politik yang begitu rapi, baik itu komunikasi dengan langsung dan tidak langsung. Abdul Gafar Usman juga sosok yang terbuka dalam berkomunikasi beliau tidak membedakan konstituennya yang datang untuk berjumpa. Abdul Gafar Usman juga melakukan komunikasi lewat media massa (media elektronik dan media cetak).

Dalam proses komunikasi politik yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman, beliau juga membentuk koordinator daerah (Korda) sebagai perpanjangan tangan Abdul Gafar Usman (Anggota DPD RI Riau) dalam penyampaian dan penampung aspirasi yang datang dari konstituen. Abdul Gafar Usman juga memberdayakan Staf di kantor Jakarta dan Pekanbaru sebagai manajemen kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman sebagai anggota DPD RI.

Menurut penulis bahwa strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman telah sesuai dengan fungsi media itu sebagai penyebar informasi dan juga sebagai alat untuk membentuk opini publik. Oleh sebab itu Abdul Gafar Usman harus meningkatkan peran sertanya sebagai anggota DPD RI dalam membangun Riau kedepan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPD RI Abdul Gafar Usman juga melakukan komunikasi dengan pemangku jabatan baik itu ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, hal ini beliau lakukan agar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat bisa diselesaikan dengan cepat.



Ada hal menarik yang penulis amati dalam strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman selaku anggota DPD RI Riau beliau adalah sosok yang sangat sederhana, dia selalu berkomunikasi dengan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat dalam setiap kegiatan reses atau kunjungan. Abdul Gafar Usman juga menjalin komunikasi dengan anggota DPD RI Riau lainnya serta legislator pusat asal Riau lainnya.

Abdul Gafar Usman selalu membagi waktunya dalam satu minggu, mengklasifikasi kegiatan prioritas kelembagaan, kegiatan masyarakat/konstituen dan kegiatan pribadi dan keluarga.

#### **B. Konstituen Abdul Gafar Usman**

Abdul Gafar Usman sejak terpilih menjadi anggota DPD RI asal Riau untuk periode 2009-2014, banyak sekali hal-hal yang sudah dilaksanakan sebagai anggota DPD RI. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 22 tahun 2003 pasal 50, disebutkan bahwa anggota DPD RI mempunyai pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya. Seperti penulis amati dalam berbagai dokumen kegiatan yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman (DPD RI Riau), bahwa beliau telah mengkomunikasikan harapan dari masyarakat Riau kepada Menteri Keuangan dan ESDM untuk Dana Bagi Hasil yang lebih lebih besar bagi provinsi Riau. (Dokumentasi Abdul Gafar Usman, Riau Pos : 9 Maret 2010)

Untuk menjalin komunikasi khusus dengan konstituen Abdul Gafar Usman telah mengelompokkan konstituen-konstituennya, sehingga mempermudah proses komunikasi dan proses memberikan informasi yang penting terhadap konstituennya.

Abdul Gafar Usman mempunyai konstituen-konstituen yang loyal terhadap beliau, sehingga dalam menampung aspirasi-aspirasi konstituen Abdul Gafar Usman lebih memprioritas kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi binaan beliau.

Dalam kunjungan/reses yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman terhadap konstituennya di Riau beliau selalu memberikan harapan serta motivasi kepada masyarakat Riau, agar konstituennya di Riau menjalankan nilai-nilai agama dan ajaran Pancasila dalam kegiatan sehari-hari.

### **C. Faktor Penghambat dan Pendukung Komunikasi Politik Abdul Gafar Usman terhadap konstituen**

Faktor Penghambat, yaitu :

1. Terbatasnya fungsi dan wewenang DPD RI yang tidak sama dengan lembaga legialtif lainnya menjadi salah satu faktor penghambat dalam komunikasi politik Abdul Gafar Usman, sehingga aspirasi yang diserap dari masyarakat Abdul Gafar Usman hanya sebatas menyampaikan kepada pihak terkait.
2. DPD RI asal Riau belum mempunyai kantor khusus untuk menampung aspirasi masyarakat, sehingga Abdul Gafar Usman sebagai anggota DPD

RI asal Riau kesulitan untuk membagi waktu ketika bertemu langsung dengan para konstituennya.

3. DPD RI tidak mempunyai anggaran yang khusus untuk pembinaan masyarakat, sehingga Abdul Gafar Usman tidak bisa berbuat banyak untuk kemajuan konstituennya.
4. Persepsi masyarakat terhadap tugas, pokok dan fungsi DPD RI belum diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat, sehingga aspirasi yang diterima tidak sinkron.

Faktor Pendukung, yaitu :

1. Abdul Gafar Usman menggunakan media cetak ataupun elektronik sebagai alat yang cocok untuk menyampaikan program-program DPD RI.
2. Abdul Gafar Usman diberikan fasilitas yang cukup khusus untuk melakukan kunjungan ke konstituen, sehingga beliau dapat melakukan hubungan silaturahmi secara berkelanjutan dengan konstituennya selagi masih berada di Riau.
3. Abdul Gafar Usman memanfaatkan jaringan-jaringan yang sudah terbentuk dari dulu ketika dia aktif diberbagai macam pekerjaan dan organisasi, sehingga beliau mampu untuk melakukan komunikasi yang baik dengan konstituennya di Riau.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa penulis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman (anggota DPD RI daerah pemilihan Riau) terhadap konstituennya yaitu melalui komunikasi langsung ketika melaksanakan kunjungan atau reses (Ceramah, Diskusi, dll), serta melakukan komunikasi dimedia cetak dan media elektronik.
2. Dalam menyelesaikan aspirasi yang datang dari konstituen Abdul Gafar Usman selalu berkomunikasi dengan stake holder yang memegang kebijakan, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggota DPD RI Riau lainnya untuk menyelesaikan aspirasi yang datang dari konstituen.
3. Dalam setiap kunjungan atau kegiatan reses Abdul Gafar Usman selalu menyampaikan kepada konstituen agar menjalankan perintah agama dan menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
4. Dalam menampung aspirasi konstituen Abdul Gafar Usman menggunakan simbol komunikasi terbuka dengan metode 3S (Sampaikan, Serap, dan Selesaikan), serta memberdayakan Staf yang diangkatnya baik

itu di Kantor Jakarta dan Pekanbaru serta membentuk Koordinator Daerah.

5. Untuk mengetahui konstituen, Abdul Gafar Usman mengelompokkan konstituen menurut kelompok dan golongannya, agar mudah berkoordinasi.
6. Faktor pendukung dalam setiap kegiatan kunjungan atau reses yang dilakukan oleh Abdul Gafar Usman terletak pada terjalannya komunikasi yang efektif antar sesama staf dan korda serta konstituen, sehingga kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar.
7. Faktor penghambat dalam berkomunikasi dengan konstituen ialah terletak pada kurang pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tugas dan wewenang DPD RI, sehingga apa yang disampaikan tidak sinkron terhadap tugas dan wewenang DPD RI itu sendiri.

## **B. Saran-saran**

Sebagai langkah terakhir dari proses penulisan ini, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran maupun masukan berkaitan dengan masalah yang penulis angkat, hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan penulis saat ini. Maka menurut hemat penulis ada beberapa *stressing point* yang ingin penulis sarankan, diantaranya :

1. Untuk mewujudkan komunikasi yang efektif dan berkesinambungan terhadap konstituen di Provinsi Riau Abdul Gafar Usman lebih mengaktifkan kantor perwakilan DPD RI yang terdapat di Pekanbaru dan

memberikan informasi terbaru tentang lembaga DPD kepada Koordinator Daerah yang telah dibentuk.

2. Diharapkan adanya sosialisasi yang khusus dan berkelanjutan tentang lembaga DPD RI, karena lembaga DPD merupakan lembaga yang baru didalam ketatanegaraan Indonesia.
3. Dalam berkomunikasi dengan konstituen, Abdul Gafar Usman diharapkan lebih mengefektifkan lagi berkomunikasi dengan cyber media, baik itu Facebook, Blog dan web.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Alfian, Teuku Ibrahim. *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Pusat Dekumentasi dan Informasi Aceh. Banda Aceh. 1999
- Arifin, Anwar. *Komunikasi Politik (Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2011.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana. Jakarta. 2008
- Buku Saku DPRD, *Seri Penguatan Legislatif, Membina Hubungan dengan Konstituen*, LGSP. Jakarta. 2009
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik (Konsep, Teori, dan Strategi)*. Rajawali Pers. Jakarta. 2009.
- DPD/MPR, Kelompok. *Untuk Apa DPD RI?*. Setjend DPD RI. Jakarta. 2008.
- DPD RI, *Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2012-2013*. Setjend DPD RI. Jakarta. 2012.
- Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media)*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2004.
- NDI, *Hubungan dengan Konstituen. Panduan menuju praktek-praktek terbaik*. Jakarta, NDI. 2008
- Rousydi, Latihef. *Dasar-Dasar Rhetorica Komunikasi dan Informasi*. Firma Rimbow. Medan. 1989.
- Subardjo, *Dewan Perwakilan Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bikameral dalam Lembaga Perwakilan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012.

**Sumber Non Buku :**

Dokumentasi-Dokumentasi Kegiatan Reses Abdul Gafar Usman.

Harian Kompas, 30-06-2003

Profil Abdul Gafar Usman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 *tentang Susunan dan Kedudukan Majelis*

*Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan*

*Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 *tentang Pemilihan Umum Anggota*

*Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan*

*Perwakilan Rakyat Daerah.*

<http://dpd.go.id/blog/abdulgafarusman/about/>

[www.dpd.go.id/tatib\\_anggota\\_dpd\\_ri](http://www.dpd.go.id/tatib_anggota_dpd_ri) 2009

<http://www.pemiluindonesia.com/kamus>

Wawancara Khusus *dengan Abdul Gafar Usman dilaksanakan pada tanggal*

*10 Januari 2013, di Pekanbaru.*

Wawancara Khusus *dengan Abdul Gafar Usman dilaksanakan pada tanggal*

*18 Januari 2013, di Jakarta.*

Wawancara Khusus *dengan Konstituen Abdul Gafar Usman dilaksanakan pada*

*07-10 Maret 2013, di Riau.*

Wawancara *dengan Konstituen Abdul Gafar Usman dilaksanakan pada*

*07-10 Maret 2013, di Riau.*